

**RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)
MATA KULIAH PEMBANGUNAN POLITIK**



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM STUDI ILMU POLITIK

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

MATA KULIAH	KODE	RUMPUN MK	BOBOT (SKS)	SEMESTER	TANGGAL PENYUSUNAN
Pembangunan Politik	731-2-4-2-26	Mata Kuliah Prodi	3	4	16 April 2020
OTORISASI	Pengembang RPS		Koordinator RMK		Kaprosdi
	Fransiskus X. Gian Tue Mali, S.Ikom., M.Si		Fransiskus X. Gian Tue Mali, S.Ikom., M.Si		Fransiskus X. Gian Tue Mali, S.Ikom., M.Si
Capaian Pembelajaran (CP)	CPL				
		<p>1. Sikap</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius; b. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika; c. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik; d. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa; e. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain; f. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan pancasila; g. Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan; h. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara; i. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan; j. Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. <p>2. Keterampilan Umum</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan/atau teknologi sesuai dengan bidang keahliannya; b. Mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan, teknologi atau seni sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah untuk menghasilkan solusi, gagasan, desain, atau kritik seni serta menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir; 			

		<p>c. Mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis terhadap informasi dan data; d. mengelola pembelajaran secara mandiri;</p> <p>d. Mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya;</p> <p>3. Keterampilan Khusus</p> <p>a. Mampu mengidentifikasi, mengklasifikasi dan mensistematisasi masalah politik pada tingkat lokal yang berkembang dalam masyarakat dari pemerintahan daerah;</p> <p>b. Mampu merumuskan pilihan-pilihan pemecahan masalah dalam bidang politik lokal dan otonomi daerah, termasuk kekuatan dan kelemahan setiap pilihan, yang dapat dijadikan sebagai dasar dalam proses pengambilan kebijakan;</p> <p>c. Mampu membandingkan praktek politik lokal dan pemerintahan daerah, baik dimensi spasial (antar daerah, antarnegara, antarkomunitas, dan antarindividu) maupun dalam dimensi waktu;</p> <p>d. Mampu membangun konsensus (consensus building) dalam proses politik lokal dan pemerintahan daerah;</p> <p>e. Mampu memberdayakan masyarakat melalui civil society dan menjalankan peran civil society dalam kerangka sistem politik tingkat lokal dan pusat;</p> <p>f. Mampu melakukan riset politik dengan menggunakan salah satu metode penelitian;</p> <p>g. Mampu menganalisis persoalan politik lokal dan pemerintahan daerah dengan berbagai teknik analisis;</p> <p>4. Pengetahuan</p> <p>a. Menguasai konsep praktik politik baik di tingkat lokal maupun pusat;</p> <p>b. Menguasai mekanisme sistem pemerintahan administrasi pada pemerintahan daerah dan pemerintahan pusat;</p> <p>c. Menguasai konsep teoretik dalam teori politik dan pemerintahan yang terkait dengan kekuasaan, perilaku politik, komunikasi politik, yang terjadi dalam sistem politik pada tingkat lokal dan pusat;</p> <p>d. Menguasai mekanisme kerja civil society dalam kerangka otonomi daerah dan perilakunya dalam sistem politik tingkat lokal dan pusat;</p> <p>e. Menguasai tugas dan fungsi civil society dalam sistem politik;</p> <p>f. Menguasai teknik verifikasi konsep-konsep politik dan pemerintahan untuk memahami bekerjanya kekuasaan dalam realitas empiris;</p> <p>g. Menguasai dasar – dasar metode penelitian politik (metode penelitian sosial, baik kuantitatif maupun kualitatif);</p> <p>h. h. Menguasai substansi fatsun politik untuk memahami perilaku politik di tingkat lokal maupun pusat dalam kerangka otonomi daerah;</p>
	CPMK	<ol style="list-style-type: none"> 1. CP1 Mampu memahami konsep dasar dalam pembangunan politik 2. CP2 Memahami prinsip-prinsip umum dalam pembangunan politik 3. CP3 Memahami tantangan dan tahapan pembangunan politik 4. CP4 Menganalisis secara kritis pembangunan politik di berbagai negara, 5. CP5 Mampu memperbandingkan mekanisme pembangunan politik di berbagai Negara 6. CP6 Mampu menerapkan sikap yang mendukung pembangunan politik.
	Mata kuliah ini bertujuan untuk membahas konsep, definisi dan teori-teori tentang pembangunan politik, pembangunan demokrasi dan isu-isu kontemporer, keterkaitan dengan sistem politik dan peran-peran kelembagaan dalam sistem politik tersebut, termasuk permasalahan pemilihan umum dan otonomi daerah.	

Deskripsi Singkat MK	Selain itu kuliah ini bertujuan untuk memantapkan pengetahuan dan pemahaman mahasiswa tentang konsep, teori dan pendekatan yang lazim digunakan dalam membicarakan isu-isu kontemporer yang berkaitan dengan pembangunan politik. Melalui teori dan pendekatan tersebut diharapkan mahasiswa dapat mengaplikasikannya dalam penulisan, analisis dan <i>critical review</i> .	
Referensi Utama	<ol style="list-style-type: none"> Affan Gaffar, 1983, <i>Pembangunan Politik Di Dalam Ilmu Politik</i>, CV Rajawali, Jakarta 2006, <i>Politik Indonesia Transisi Mmenuju Demokrasi</i>, Pustaka Pelajar, Yogyakarta Alfian, 1981, <i>Beberapa Masalah Pembaharuan Politik Di Indonesia</i>, CV Rajawali, Jakarta. Arief Budiman, 1996, <i>Teori Pembangunan Dunia Ketiga</i>, Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta Beling & Totten, 1980, <i>Modernisasi Dan Masalah Pembangunan</i>, CV Rajawali, Jakarta, Chilcote, Ronald H, 2004, <i>Teori Perbandingan Politik</i>, Gramedia, Jakarta, Huntington, Samuel P., 1983, <i>Tertib Politik di Dalam Masyarakat Yang Sedang Berubah</i>, Penerbit Rajawali, Jakarta., Juwono Sudarsono, 1985, <i>Pembangunan Politik Dan Perubahan Politik</i>, PT Gramedia, Jakarta., Leo Agustino, 2009, <i>Politik & Perubahan Antara Reformasi Politik di Indonesia dan Politik Baru di Malaysia</i>, Graha Ilmu, Yogyakarta Mohtar Mas'oe'd dan Colin MacAndrews, 2006, <i>Perbandingan Sistem Politik</i>, Gajah Mada University Press, Yogyakarta. Nazaruddin Syamsuddin, 1991, "Dimensi-dimensi Vertikal, Dan Horizontal Dalam Integrasi Politik", dalam <i>Jurnal Analisa Ilmu Politik</i>, Vol. 8, 1991, PT Gramedia dan AIPI, Jakarta Palmer, Maftrin, 1989, <i>Dilemmas of Political Development, An Introction to the Politics of Developing Areas</i>, F E Peacock Publishers, Inc., Ithaca Willies, Katie, 2005, <i>Theories and Practices of Development</i>, Routledge, New York. 	
Media Pembelajaran	Perangkat lunak:	Perangkat keras:
	MS Windows MS Office Power Point MS Windows Media Player Internet Explorer	Laptop Spidol board marker Whiteboard Poster LCD
Matakuliah syarat	-	
Dosen Pengampu	Fransiskus X. Gian Tue Mali, S.Ikom., M.Si	

Min ngu Ke	Sub-CP-MK (Kemampuan Akhir yang Direncanakan)	Bahan Kajian (Materi Pembelajaran)	Estimasi Waktu	Teknik Pembelajaran	Pengalaman Belajar (Penugasan)	Penilaian		
						Kriteria	Indikator Penilaian	Bo bot %
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Mahasiswa diharapkan mampu memahami tujuan perkuliahan Pembangunan Politik, terutama memahami RPS	Latar belakang mata kuliah pembangunan politik 1. Penjelasan rps 2. Penjelasan tujuan kuliah pembangunan politik. 3. Penjelasan masalah-masalah yang dihadapi dalam	2 x 50 mnt	Presentasi, Diskusi dan tanya jawab	Mahasiswa mendengarkan Ceramah, Mencatat, Tanya Jawab, Absensi, serta pemberian judul buku yang harus dibaca sebelum perkuliahan berikut.	Mahasiswa mendengarkan dan menanyakan hal yang tidak dipahami	Pemahaman tentang materi yg diajarkan proses diskusi dan perdebatan dalam kelas	

		pembangunan politik di suatu negara. 4. Pembangunan politik di indonesia						
2	Mahasiswa diharapkan mampu memahami konsep dan teori pembangunan politik serta sejarah perkembangan Kajian Pembangunan Politik	Defenisi konsep dan teori pembangunan politik 1. Perkembangan kajian pembangunan politik 2. Konsep dasar pembangunan politik 3. Makna dan hakikat pembangunan politik 4. Mazhab dan pendekatan dalam pembangunan politik di indonesia 5. Pembangunan politik sebagai tujuan dan proses 6. Perspektif determinatif, normatif dan analitis dalam pembangunan politik	2 x 50 mnt	Presentasi, Diskusi dan tanya jawab	Mahasiswa mendengarkan Ceramah, Mencatat, Tanya Jawab, Absensi, serta pemberian judul buku yang harus dibaca sebelum perkuliahan berikut.	Mahasiswa mendengarkan dan menjelaskan kembali konsep-konsep kunci teori pembangunan politik	Pemahaman tentang materi yg diajarkan Menjelaskan ulang defenisi konsep dan argumentasi dalam proses diskusi dan perdebatan dalam kelas	5%
3	Mahasiswa mampu menjelaskan pengertian pendekatan sistem politik, serta menerapkannya dalam menganalisa pembangunan politik	Sistem dan struktur politik 1. pengetahuan sistem politik 2. Struktur dan fungsi sistem politik dalam analisa pembangunan politik	2 x 50 mnt	Presentasi, Diskusi dan tanya jawab	Mahasiswa mendengarkan Ceramah, Mencatat, Tanya Jawab, Absensi, serta pemberian judul buku yang harus dibaca sebelum perkuliahan berikut.	Mahasiswa mampu menjelaskan kembali defenisi sistem politik dan menganalisis praktik sistem politik di berbagai negara	Pemahaman tentang materi yg diajarkan proses diskusi dan perdebatan dalam kelas Rincian penjelasan sistem politik	5%
4	Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan proses pembangunan politik dan masalah-masalah yang dihadapi dalam proses tersebut.	Tahapan dan tantangan pembangunan politik 1. Tahapan dalam proses pembangunan politik 2. Hambatan dalam pembangunan politik (krisis legitimasi, krisis integrasi, identitas, partisipasi, penetrasi, dan distribusi dalam pembangunan lembaga politik).	2 x 50 mnt	Presentasi, Diskusi dan tanya jawab	Mahasiswa mendengarkan Ceramah, Mencatat, Tanya Jawab, Absensi, serta pemberian judul buku yang harus dibaca sebelum perkuliahan berikut.	Mahasiswa mendengarkan dan menguasai tahapan pembangunan politik serta tantangannya	Pemahaman tentang materi yg diajarkan proses diskusi dan perdebatan dalam kelas Kemampuan menjelaskan kembali tahapan dan tantangan pembangaunan politik	5%

		3. Tipologi dan ukuran pembangunan politik						
5	Mahasiswa mampu menjelaskan pengaruh modernisasi, dan industrialisasi terhadap pembangunan politik.	Modernisasi, dan industrialisasi 1. Pengertian pembangunan, modernisasi dan industrilisasi 2. Kewenangan libertarian sekuler dan mobilisasi sakral dalam modernisasi politik. 3. Hakikat modernisasi	2 x 50 mnt	Presentasi, Diskusi dan tanya jawab	Mahasiswa mendengarkan Ceramah, Mencatat, Tanya Jawab, Absensi, serta pemberian judul buku yang harus dibaca sebelum perkuliahan berikut.	Mahasiswa mampu menjelaskan konsep modernisasi dan industrialisasi sebagai bagian dari pembangunan	Pemahaman tentang materi yg diajarkan proses diskusi dan perdebatan dalam kelas. Kejelasan deskripsi konsep dan implementasi modernisasi dan industrialisasi	
6-7	Mahasiswa mampu menemukan praktek teori pembangunan kapitalis	Teori-teori pembangunan kapitalis 1. Teori Evolusi (Agust Comte) 2. Teori Struktural Fungsionalisme (Robert Merton Dan Talcot Parsons) 3. Teori Need For Achievement (McClelland) 4. Teori Penciptaan Tenaga Kerja (ILO) 5. Teori Pemenuhan Kebutuhan Dasar (Ul Haq) 6. Agriculture First Development (Mellor) 7. Pembangunan Desa Terpadu (Waterson) 8. The New International Economic Order	2 x 50 mnt	Presentasi, Diskusi dan tanya jawab	Mahasiswa mendengarkan Ceramah, Mencatat, Tanya Jawab, Absensi, serta pemberian judul buku yang harus dibaca sebelum perkuliahan berikut.	Mahasiswa mendengarkan, memahami, dan mampu menjelaskan poin kunci dari setiap teori yang dijelaskan	Pemahaman tentang materi yg diajarkan proses diskusi dan perdebatan dalam kelas Kemampuan memahami dan mampu menggunakan teori dalam menganalisis fenomena pembangunan politik di berbagai negara	20 %
8	Tugas makalah dan presentasi untuk menguji pengetahuan mahasiswa mengenai tema perkuliahan yang telah dibahas dan sebagai bentuk latihan <i>public speaking</i> , penguasaan materi, dan latihan	Tugas makalah terstruktur Mahasiswa mempresentasikan tugas makalah baik secara individu maupun kelompok berdasarkan tema yang telah diberikan 1 minggu sebelumnya	2 x 50 mnt	Diskusi dan presentasi makalah	Mahasiswa mempresentasikan makalah dan tugas terstruktur	Mahasiswa menjelaskan isi makalah dengan data dan teori yang digunakan	Struktur penulisan makalah, isi makalah, konsep atau teori yang digunakan, peristiwa atau masalah yang dibahas, dan kemampuan menguasai dan menjelaskan isi makalah serta menjawab pertanyaan teman kelas.	5%

	kemampuan menulis karya ilmiah							
9	Mahasiswa mampu menjelaskan tentang pemerintahan yang baik dan bagaimana seharusnya sistem birokrasi di sebuah negara dijalankan	Good governance dan birokrasi 1. Good governance 2. Birokrasi, komponen birokrasi 3. Birokrasi modern 4. Peranan birokrasi sebagai sarana dan model perubahan sosial dan ekonomi	2 x 50 mnt	Presentasi, Diskusi dan tanya jawab	Mahasiswa mendengarkan Ceramah, Mencatat, Tanya Jawab, Absensi, serta pemberian judul buku yang harus dibaca sebelum perkuliahan berikut.	Mahasiswa mampu menjelaskan prinsip-prinsip dan tujuan <i>good governance</i>	Pemahaman tentang materi yg diajarkan proses diskusi dan perdebatan dalam kelas Menjelaskan konsep dan prinsip <i>good dovernance</i>	5%
10	Mampu menjelaskan mobilitas sosial dan ekonomi terhadap pelembagaan sistem politik	Mobilitas sosial 1. Dilema persoalan mobilitas dan stabilitas dalam seleksi kepemimpinan 2. Model eksklusif dan inklusif kepemimpinan politik 3. Dampak modernisasi terhadap pelembagaan politik 4. Hubungan perluasan partisipasi dengan pelembagaan politik	2 x 50 mnt	Presentasi, Diskusi dan tanya jawab	Mahasiswa mendengarkan Ceramah, Mencatat, Tanya Jawab, Absensi, serta pemberian judul buku yang harus dibaca sebelum perkuliahan berikut.	Mahasiswa mendengarkan dan menjelaskan dimensi-dimensi dalam mobilitas sosial dan peran pemimpin politik dalam menggerakkan mobilitas sosial	Pemahaman tentang materi yg diajarkan proses diskusi dan perdebatan dalam kelas Mahasiswa mampu menjelaskan defenisi mobilitas sosial dan peran penggerak mobilitas sosial	5%
11	Mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan pengaruh integrasi nasional dan ancaman terhadapnya dalam pembangunan politik di sebuah negara	Integrasi nasional 1. Pengertian dan konsep integrasi nasional 2. Makna integrasi nasional sebagai bagian dari pembangunan politik Separatisme dan disintegrasi yang mengancam	2 x 50 mnt	Presentasi, Diskusi dan tanya jawab	Mahasiswa mendengarkan Ceramah, Mencatat, Tanya Jawab, Absensi, serta pemberian judul buku yang harus dibaca sebelum perkuliahan berikut.	Mahasiswa mendengarkan dan mampu menjelaskan defenisi, tujuan, dan proses integrasi sosial	Pemahaman tentang materi yg diajarkan proses diskusi dan perdebatan dalam kelas Kemampuan menjelaskan defenisi, tujuan, dan proses integrasi sosial	5%
12	Mahasiswa mampu menganalisis pembangunan politik dan prosesnya serta isu-isu yang berkembang termasuk aspek apa saja yang mempengaruhi	Pembangunan politik di negara berkembang - indonesia 1. Pembangunan politik di negara berkembang: tantangan dan hambatan. 2. Hasil pembangunan politik 3. Otonomi daerah di indonesia	2 x 50 mnt	Presentasi, Diskusi dan tanya jawab	Mahasiswa mendengarkan Ceramah, Mencatat, Tanya Jawab, Absensi, serta pemberian judul buku yang harus dibaca sebelum perkuliahan berikut.	Mahasiswa mampu menjelaskan kondisi umum di negara berkembang dalam tahapan pembangunan politik yang dilakukan	Pemahaman tentang materi yg diajarkan proses diskusi dan perdebatan dalam kelas Kemampuan menjelaskan kondi-kondisi negara berkembang dalam melakukan pembangunan politik	5%

	pembangunan politik di Indonesia							
13	Mahasiswa mampu menjelaskan pengaruh militer dalam pembangunan dan pendewasaan politik	Militer dan pembangunan politik 1. Pengaruh militer dalam pembangunan politik 2. Hubungan sipil dan militer di Indonesia 3. Reformasi militer dan hubungannya dengan pembangunan politik di Indonesia	2 x 50 mnt	Presentasi, Diskusi dan tanya jawab	Mahasiswa mendengarkan Ceramah, Mencatat, Tanya Jawab, Absensi, serta pemberian judul buku yang harus dibaca sebelum perkuliahan berikut.	Mendengarkan dan mampu menjelaskan hubungan sipil dan militer dalam sistem politik	Pemahaman tentang materi yg diajarkan proses diskusi dan perdebatan dalam kelas Kemampuan menjelaskan hubungan sipil dan militer dalam sistem politik serta dampaknya terhadap pembangunan politik	5%
14-15	Mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan kondisi pasca pembangunan dan tantangan Globalisasi	Pembangunan Politik dan Globalisasi 1. Refleksi menuju era pasca pembangunan 2. Mekanisme kerja dan proses globalisasi 3. Neo liberalisme dan mitos pasar bebas 4. Ancaman dan tantangan globalisasi	2 x 50 mnt	Presentasi, Diskusi dan tanya jawab	Mahasiswa mendengarkan Ceramah, Mencatat, Tanya Jawab, Absensi, serta pemberian judul buku yang harus dibaca sebelum perkuliahan berikut. Mahasiswa membuat tugas analisis	Mahasiswa mendengarkan dan mampu menjelaskan hubungan globalisasi dan pembangunan politik dalam sebuah negara.	Pemahaman tentang materi yg diajarkan proses diskusi dan perdebatan dalam kelas Kemampuan menjelaskan hubungan globalisasi dan pembangunan politik dengan argumentasi dan data objektif Struktur, substansi dan ketajaman data tugas analisis	5%
16	Tugas makalah dan presentasi untuk menguji pengetahuan mahasiswa mengenai tema perkuliahan yang telah dibahas dan sebagai bentuk latihan <i>public speaking</i> , penguasaan materi, dan latihan kemampuan menulis karya ilmiah	Tugas makalah dan review pembelajaran (Evaluasi Akhir Semester) 1. Mahasiswa mempresentasikan tugas makalah baik secara individu maupun kelompok berdasarkan tema yang telah diberikan 1 minggu sebelumnya. 2. Review perkuliahan 1 semester dan evaluasi perkuliahan	2 x 50 mnt	Diskusi dan presentasi makalah	Mahasiswa mempresentasikan makalah dan tugas terstruktur		Struktur penulisan makalah, dan penguasaan konsep pembangunan politik dan penerapannya dalam sistem negara demokrasi dan di Indonesia.	20%

SISTEM PENILAIAN

SISTEM PENILAIAN

I. PERSYARATAN UMUM

A. Kehadiran:

1. Jumlah kuliah tatap muka per semester yang harus dihadiri oleh mahasiswa/i adalah 16 pertemuan.
2. Batas toleransi kehadiran mahasiswa/i 75 % dari total jumlah pertemuan.
3. Kriteria ketidakhadiran mahasiswa/i adalah: S (sakit) ditandai dengan surat keterangan dokter, I (Ijin) ditandai dengan surat ijin resmi, dan A (Alpa), maksimal 4x pertemuan kelas.
4. Mahasiswa aktif dan partisipatif mengikuti ibadah keluarga besar UKI dan tidak diperkenankan melakukan kegiatan lain selama ibadah berlangsung.
5. Toleransi keterlambatan perkuliahan (dosen + mahasiswa/i) setiap tatap muka adalah 15 menit. Jika setelah 15 menit dosen + mahasiswa/i tidak hadir maka perkuliahan dibatalkan. (kecuali ada persetujuan atau ada masalah tertentu).

B. Perkuliahan:

1. Mata kuliah yang dilaksanakan mahasiswa berbasis KKNI.
2. Mata kuliah berbasis KKNI dinilai/dievaluasi per topik yang telah tuntas
3. Persentase penilaian/evaluasi ditentukan oleh dosen yang bersangkutan sesuai kompetensi MK dan capaian pembelajaran.
4. Tidak diperkenankan meninggalkan kelas selama perkuliahan tanpa ijin oleh dosen.
5. Mahasiswa tidak diijinkan membuka HP saat proses belajar mengajar berlangsung tanpa ijin oleh dosen.
6. Mahasiswa memakai busana yang sopan.
7. Tidak membuat kegaduhan selama proses pembelajaran berlangsung.

C. Kejahatan akademik: plagiarisme Menurut Peraturan Menteri Pendidikan RI Nomor 17 Tahun 2010:

“Plagiat adalah perbuatan sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah, dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan atau karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya, tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai.” (Permendik No 17 Tahun 2010 dan Panduan Anti Plagiasime terlampir).

Sanksi sesuai Permendik No 17 Tahun 2010 Pasal 12:

1. Teguran;
2. Peringatan tertulis;
3. Penundaan pemberian sebagian hak mahasiswa;
4. Pembatalan nilai satu atau beberapa mata kuliah yang diperoleh mahasiswa;
5. Pemberhentian dengan hormat dari status sebagai mahasiswa;
6. Pemberhentian tidak dengan hormat dari status sebagai mahasiswa; atau
7. Pembatalan ijazah apabila mahasiswa telah lulus dari suatu program.

II. PERSYARATAN KHUSUS

A. Tugas dan Tanggung jawab mahasiswa/i

Pada setiap tatap muka mahasiswa/i diwajibkan berpartisipasi aktif dalam proses perkuliahan melalui hal-hal berikut

1. Kuis reguler: mahasiswa wajib mempersiapkan diri dan mengikuti kuis reguler yang diadakan setiap tatap muka. Materi kuis diambil dari materi yang akan dibahas pada tatap muka hari itu.
2. Presentasi: mahasiswa/i wajib berpartisipasi aktif dalam diskusi yang diadakan dalam setiap tatap muka sesuai kebutuhan materi perkuliahan (lihat RPS).
3. Studi lapangan/*service learning*: mahasiswa/i wajib berpartisipasi aktif dalam studi lapangan yang diadakan di luar kampus sesuai topik materi perkuliahan yang sudah ditentukan dalam RPS.
4. Tugas Mandiri: mahasiswa/i wajib mengerjakan tugas mandiri dalam bentuk review materi kuliah yang telah diberi tanda bintang pada referensi yang digunakan di RPS.
5. Tugas terstruktur: mahasiswa/i wajib membentuk kelompok untuk mendiskusikan berbagai fenomena sosiologis yang berhubungan dengan media dengan menerapkan

konsep, teori dan metode analisis sosiologis media untuk menganalisis dan menjelaskannya.

B. Gaya Selingkung Pengerjaan Tugas

1. Untuk mengerjakan tugas review, mahasiswa/i wajib mematuhi ketentuan berikut:
 - a. Artikel mahasiswa/i harus ditulis dengan komposisi: Pendahuluan (1 hal), Pembahasan (2 hal), Kesimpulan (½ hal).
 - b. Daftar referensi minimal menggunakan 3 buku dan 2 jurnal ilmiah.
 - c. Pengutipan dan penulisan daftar pustaka menggunakan “Chicago Manual Style” (terlampir).
 - d. Ketentuan kertas A4, huruf Cambria, ukuran jenis 12, spasi 1½.
2. Untuk mengerjakan tugas makalah kelompok, mahasiswa/i wajib mematuhi ketentuan berikut:
 - a. Artikel mahasiswa/i harus ditulis dengan komposisi: Pendahuluan berisi permasalahan dan pentingnya isu/fenomena tersebut dibahas (2 hal), Tinjauan Teoritis berisi teori apa yang hendak digunakan sebagai pisau analisis (2 hal), Pembahasan (5 hal), Kesimpulan (1 hal).
 - b. Daftar referensi minimal menggunakan 5 buku dan 10 jurnal ilmiah.
 - c. Pengutipan dan penulisan daftar pustaka menggunakan “APA (American Psychological Association).
 - d. Ketentuan kertas A4, jenis huruf Cambria, ukuran 12, spasi 1½.

III. Skala nilai akhir dalam huruf dan angka:

Nilai Akhir (NA)	Nilai Huruf (NH)	Nilai Mutu (NM)
80,0-100,0	A	4,0
75,0-79,0	A-	3,7
70,0-74,9	B+	3,3
65,0-69,9	B	3,0
60,0-64,9	B-	2,7
55,0-59,9	C	2,3
50,0-54,9	C-	2,0
45,0-49,9	D	1,0
<44,9	E	0

Prosentase Tahap Penilaian Tugas dan kewajiban mahasiswa (dapat diganti/disesuaikan oleh dosen)

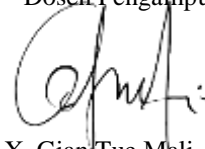
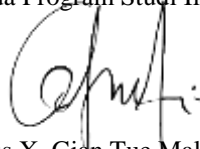
Kehadiran	10 %
Tugas Mandiri I, II,III (Diskusi Dan Makalah)	50 %
Ujian Tengah Semester (UTS)	20 %
Ujian Akhir Semester (UAS)	20 %

Jakarta, 16 April 2020

Mengetahui

Ketua Program Studi Ilmu Politik

Dosen Pengampu



Fransiskus X. Gian Tue Mali, S.Ikom, M.Si

Fransiskus X. Gian Tue Mali, S.Ikom, M.Si

Daftar Hadir

Tahun Akademik / Semester

Program Studi

Mata Kuliah

Jumlah SKS

Kelas

Jadwal

Jumlah Mahasiswa

Tahun Akademik 2020/2021 / Semester Genap

731 - Ilmu Politik - S1

Pembangunan Politik (73124126)

3 SKS

A

Rabu, 11:00 - 13:30 | Ruang Kuliah

13 Mahasiswa

[← Kembali](#) [+ Buat Daftar Kehadiran](#)

Pertemuan #1: 07-Apr-2021 11:00 - 13:30	(Hadir: 5, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) Fransiskus X G Tue Mali, S.Ikom., M.Si
Pertemuan #2: 31-Mar-2021 11:00 - 13:30	(Hadir: 6, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) Fransiskus X G Tue Mali, S.Ikom., M.Si
Pertemuan #3: 24-Mar-2021 11:00 - 13:30	(Hadir: 6, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) Fransiskus X G Tue Mali, S.Ikom., M.Si
Pertemuan #4: 16-Apr-2021 15:00 - 17:30	(Hadir: 9, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) Fransiskus X G Tue Mali, S.Ikom., M.Si
Pertemuan #5: 07-May-2021 11:00 - 13:30	(Hadir: 12, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) Fransiskus X G Tue Mali, S.Ikom., M.Si
Pertemuan #6: 27-Apr-2021 15:00 - 17:30	(Hadir: 12, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) Fransiskus X G Tue Mali, S.Ikom., M.Si
Pertemuan #7: 26-Apr-2021 11:00 - 13:30	(Hadir: 12, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) Fransiskus X G Tue Mali, S.Ikom., M.Si
Pertemuan #8: 22-May-2021 11:00 - 13:30	(Hadir: 6, Tidak Hadir: 5, Sakit: 0, Izin: 1) Fransiskus X G Tue Mali, S.Ikom., M.Si
Pertemuan #9: 28-May-2021 11:00 - 13:30	(Hadir: 6, Tidak Hadir: 6, Sakit: 0, Izin: 0) Fransiskus X G Tue Mali, S.Ikom., M.Si
Pertemuan #10: 05-Jun-2021 11:00 - 13:30	(Hadir: 10, Tidak Hadir: 2, Sakit: 0, Izin: 0) Fransiskus X G Tue Mali, S.Ikom., M.Si
Pertemuan #11: 02-Jul-2021 11:00 - 13:30	(Hadir: 9, Tidak Hadir: 3, Sakit: 1, Izin: 0) Fransiskus X G Tue Mali, S.Ikom., M.Si
Pertemuan #12: 07-Jun-2021 11:00 - 13:30	(Hadir: 13, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) Fransiskus X G Tue Mali, S.Ikom., M.Si
Pertemuan #13: 14-Jun-2021 11:00 - 13:30	(Hadir: 13, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) Fransiskus X G Tue Mali, S.Ikom., M.Si
Pertemuan #14: 18-Jun-2021 11:00 - 13:30	(Hadir: 13, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) Fransiskus X G Tue Mali, S.Ikom., M.Si
Pertemuan #15: 21-Jun-2021 11:00 - 13:30	(Hadir: 13, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) Fransiskus X G Tue Mali, S.Ikom., M.Si

REKAP KEHADIRAN MAHASISWA MATA KULIAH PEMBANGUNAN POLITIK

No	NIM	Nama	Tidak Hadir	Sakit	Izin	Hadir	Total Pertemuan	Persentase Kehadiran %
1	1773150003	Yustinus Gebze	1	0	0	4	5	80
2	1573150002	Bungaran A.Kurni	0	0	0	4	4	100
3	1973150015	Sm. Angelina Sabeleake	2	0	0	10	12	83,33
4	1973150013	Rapta Mardina Saogo	1	0	0	11	12	91,67
5	1973150012	Fernando Salolit	0	0	1	7	8	100
6	1973150008	Tiur Paulinawati	0	1	0	14	15	100
7	1973150014	Alexsius Salakkopak	1	0	0	11	12	91,67
8	1973150011	Sahat M. Tampubolon	5	0	0	10	15	66,67
9	1973150001	Adrian Alexsander	2	0	0	13	15	86,67
10	1973150010	Pendiron Indra Enumbi	0	0	0	11	11	100
11	1973150006	Daniel L. Sipahutar	1	0	0	14	15	93,33
12	1773150901	Olsavira N. Surono	1	0	0	14	15	93,33
13	1873150002	Yasena N. Kakel Mirin	4	0	0	7	11	63,64
14	1573150001	Alex Magai	0	0	0	15	15	100

Hasil Penilaian

NO	NIM	Nama Mahasiswa	Tugas	UTS	UAS	TUGAS	Nilai
1	1573150001	ALEX MAGAI	70	82	78	70	A- (76)
2	1573150002	BUNGARAN A.KURNI	Tugas	0	0	0	E
3	1773150003	YUSTINUS GEBZE	0	0	0	0	E
4	1773150901	OLSAVIRA NOVALAUDIA SURONO	70	86	70	70	B+ (74.8)
5	1873150002	YASENA NOVIANA KAKEL MIRIN	0	0	0	0	E
6	1973150001	ADRIAN ALEXSANDER	70	69	75	70	B+ (71.2)
7	1973150006	DANIEL LUKMAN SIPAHUTAR	70	71	72	70	B+ (70.9)
8	1973150008	TIUR PAULINAWATI	76	79	80	75	A- (77.9)
9	1973150010	PENDIRON INDRA ENUMBI	72	87	86	70	A (80.3)
10	1973150011	SAHAT MARTUA TAMPUBOLON	0	0	0	0	E
11	1973150013	RAPTA MARDINA SAOGO	60	69	60	66	B- (63.9)
12	1973150014	ALEXSIUS SALAKKOPAK	70	76	80	70	B+ (74.8)
13	1973150015	SM. ANGELINA SABELEAKE	60	72	60	60	B- (63.6)



Mata Kuliah	: Pembangunan Politik
Hari/Tanggal	: 22 Mei 2021
Kelas	: A
Dosen	: Fransiskus X. Gian Tue Mali, M.Si
Waktu	:
Sifat Ujian	: Terbuka

Mahasiswa menjelaskan tahap pembangunan di Indonesia pasca kemerdekaan, dengan menunjukkan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur penggerak unifikasi/integrasi sosial
2. Unsur pemicu disintegrasi
3. Integrasi ekonomi
4. Capacity system politic
5. Differentiation system politic
6. Spesification system politic

Keenam unsur ini menjadi sub analisis dalam paper, sertakan kutipan sumber dan daftar pustaka.



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
UJIAN AKHIR SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2020/2021

Mata Kuliah	: Pembangunan Politik
Hari/Tanggal	: 21 Juni 2021
Kelas	: A
Dosen	: Fransiskus X. Gian Tue Mali, M.Si
Waktu	:
Sifat Ujian	: Terbuka

Mahasiswa memilih satu masalah atau peristiwa di masa pandemi yang berkaitan dengan sistem politik, serta menganalisisnya menggunakan salah satu konsep dibawah ini:

1. Mobilitas politik
2. Integrasi politik
3. Industrialisasi
4. Good Governance

Analisis dibuat dalam bentuk Artikel dengan sistematika:

- A. Pendahuluan
- B. Konsep
- C. Pembahasan
- D. Penutup
- E. Daftar Pustaka

Yang akan dinilai adalah data yang menjadi masalah yang dianalisis, kejelasan masalah, ketepatan teori, kedalaman analisis, dan ketepatan sistematika. Lama waktu pengerjaan adalah 2 minggu.

**PEMBANGUNAN
POLITIK DI NEGARA
BERKEMBANG**

INDONESIA

Kondisi Pembangunan Politik Negara Berkembang di Dunia

Pasca Perang Dunia Ke II →
Lahir Negara2 Baru



Mencegah Komunisme
→ Marshall Plan



Menciptakan
Ketergantungan Terhadap
Negara Maju

GEJALA PEMBANGUNAN POLITIK

EQUALITY

- Keterlibatan masyarakat dalam politik

CAPACITY

- Kemampuan sistem politik menghadapi kompleksitas masalah2 ekonomi, politik, sosial.

DIFERENTIATION DAN SPESIALIZATION

- Struktur politik dan pemerintahan yang spesialis

PERSAMAAN – PARTISIPASI PUBLIK

1

Partisipasi Dalam Pengambilan Keputusan, Pembuatan Kebijakan, pengawasan dan pelaksanaan kebijakan

2

Partisipasi Dalam Pemilihan Pejabat Politik/Pemerintahan

3

Partisipasi Dalam Ekonomi/Penentuan Kesejahteraan

4

Partisipasi Dalam Hukum

5

Partisipasi Dalam Struktur Pemerintahan

1 Partisipasi Dalam Pengambilan Keputusan, Pembuatan Kebijakan, pengawasan dan pelaksanaan kebijakan

Pengidentifikasian dan pengagendaaan masalah

Perumusan (formulasi) rancangan kebijakan

Pelaksanaan kebijakan

Evaluasi

HAMBATAN INTERNAL

- ✓ Masy. masih terbiasa dengan pola menerima dan melaksanakan saja.
- ✓ Masy. tidak tahu adanya kesempatan untuk berpartisipasi
- ✓ Masy. tidak tahu prosedur partisipasi
- ✓ Rendahnya sanksi hukum di kalangan masy.
- ✓ Rendahnya sanksi hukum kepada pelanggar kebijakan publik

HAMBATAN EKSTERNAL

- ✓ Tidak dibukanya kesempatan kepada masy. untuk berpartisipasi
- ✓ Masih adanya praktek sentralistik yg tidak sesuai dengan otonomi daerah
- ✓ Anggapan bahwa partisipasi masy. akan memperlambat pembuatan kebijakan publik
- ✓ Kebijakan publik belum menyentuh kepentingan masyarakat secara langsung
- ✓ Kesempatan berpartisipasi belum banyak diketahui masyarakat
- ✓ Hukum belum ditegakkan secara adil

MASALAH PRA PEMILU

- ✓ Konflik parpol
- ✓ Data dukungan parpol yang tidak lengkap
- ✓ Data DPT bermasalah
- ✓ Data ganda pendukung
- ✓ Maladministrasi parpol
- ✓ Distribusi logistik pemilu bermasalah
- ✓ Jual beli pencalonan (candidate buying) antara kandidat dan partai politik
- ✓ Calon tunggal
- ✓ Calon bermasalah
- ✓ Politisasi birokrasi dan pejabat negara

MASALAH SAAT PEMILU

- ✓ Money politics
- ✓ Pemilih ganda
- ✓ Tidak Independennya penyelenggara pemilu
- ✓ Tingginya golput
- ✓ Kertas suara rusak
- ✓ Kurangnya logistik pemilu
- ✓ Proses perhitungan suara bermasalah
- ✓ Konflik antar pendukung
- ✓ Isu SARA
- ✓ Alat peraga bermasalah

MASALAH PASCA PEMILU

- ✓ Penolakan hasil pemilu
- ✓ Konflik antar pendukung
- ✓ Perusakan fasilitas publik akibat penolakan hasil pemilu
- ✓ Tidak independennya penyelenggara pemilu

3

Partisipasi Dalam Ekonomi/Penentuan Kesejahteraan

KETIMPANGAN KESEMPATAN

Peluang yang kecil bagi anak dari keluarga miskin untuk sukses.

✓ Kekurangan Gizi. 37 % bayi lahir dan tumbuh sampai umur 2 tahun dalam keadaan kekurangan gizi.

✓ Akses terhadap dunia pendidikan yang berkualitas, sangat minim

KETIMPANGAN UPAH

Dalam dunia kerja. Pasar kerja kini dipenuhi oleh tenaga kerja, baik terampil atau tidak. Mereka yang punya kecakapan tinggi akan digaji besar sekali. Sebaliknya, yang kurang cakap dan belum punya kesempatan untuk mengembangkan diri akan terjebak dalam pekerjaan informal, bergaji kecil, dan kurang produktif.

PEMUSATAN KEKAYAAN YANG TINGGI

Sebanyak 10 persen orang kaya memiliki 77 persen seluruh kekayaan negara.

GUNCANGAN

Misalnya PHK dan bencana alam. Orang kaya tidak akan kesulitan mengatasi masalah. Sebaliknya, orang miskin, rentan ambruk pula jika terjadi guncangan ekonomi, kesehatan, sosial, politik, dan bencana alam. Masyarakat miskin juga tak punya asuransi.

11,3 %
atau 28
juta
orang
miskin

26,9 %
atau 68
juta
orang
rentan
miskin

Statistik Kemiskinan dan Ketidaksetaraan di Indonesia:

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Kemiskinan Relatif (% dari populasi)	16.6	15.4	14.2	13.3	12.5	11.7	11.5	11.0	11.1	10.9 ¹
Kemiskinan Absolut (dalam jutaan)	37	35	33	31	30	29	29	28	29	28 ¹
Koefisien Gini/ Rasio Gini	0.35	0.35	0.37	0.38	0.41	0.41	0.41	0.41	0.41	0.40

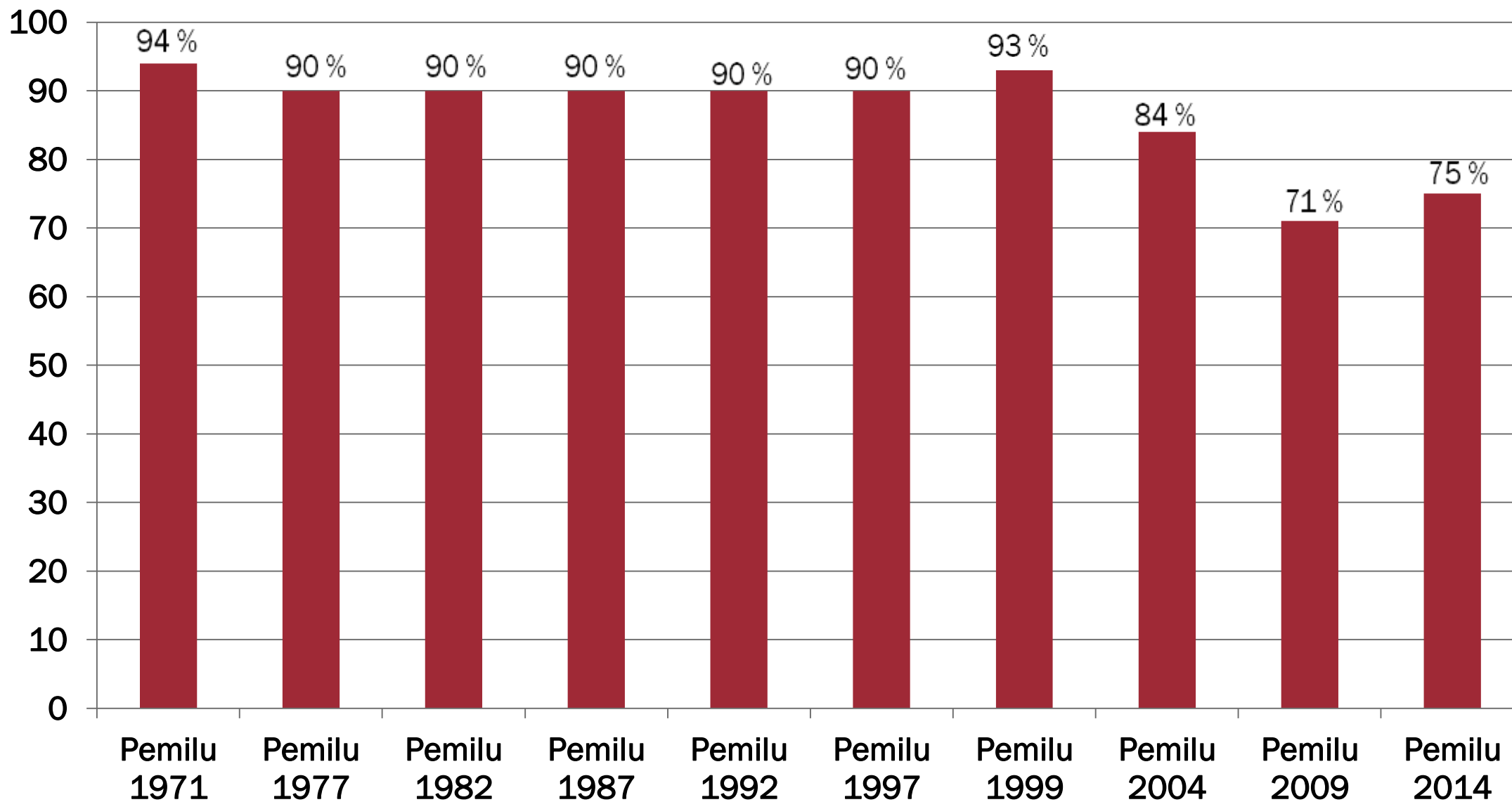
4 Partisipasi Dalam Hukum

1. Lemahnya Integritas Penegakan Hukum
2. Tidak Ada Pengawasan Yang Efektif
3. Masih Melihat Hukum Dari Kontennya
4. Mentalitas Praktisi Hukum Yang Lemah
5. Struktur Hukum Yang Overlapping Kewenangan
6. Sarana dan Prasarana Hukum Kurang Memadai
7. Peraturan Hukum Yang Kurang Jelas
8. Independensi Hakim Masih Bermasalah
9. Proses Peradilan Yang Masih Bermasalah
10. Kesadaran Hukum Masyarakat Yang Kurang
11. Lemahnya Political Will dan Political Action
12. Penegakan Hukum Masih Positivist-Legalistis
13. Peraturan Perundang-Undangan Masih Belum Memihak Rakyat
14. Kebijakan Seringkali Diputuskan Oleh Pihak Terkait
15. Budaya Lama Yang Terus Dilanjutkan

PARTISIPASI PEMILIH DARI PEMILU KE PEMILU



Tingkat
Partisipasi
Pemilu



KAPASITAS

1. Kemampuan Sistem Politik Dalam Bidang **POLITIK**
2. Kemampuan Sistem Politik Dalam Bidang **POLITIK LUAR NEGERI**
3. Kemampuan Sistem Politik Dalam Bidang **DEMOKRATISASI**
4. Kemampuan Sistem Politik Dalam Bidang **EKONOMI**
5. Kemampuan Sistem Politik Dalam Bidang **HUKUM**
6. Kemampuan Sistem Politik Dalam Bidang **HUBUNGAN SOSIAL MASYARAKAT**

DIFERENSIASI DAN SPESIALISASI

1. Kemampuan Struktur Politik/Pemerintahan Di Bidang **DEMOKRASI**
2. Kemampuan Struktur Politik/Pemerintahan Di Bidang **POLITIK LUAR NEGERI**
3. Kemampuan Struktur Politik/Pemerintahan Di Bidang **ADMINISTRASI MASYARAKAT**
4. Kemampuan Struktur Politik/Pemerintahan Di Bidang **EKONOMI**
5. Kemampuan Struktur Politik/Pemerintahan Di Bidang **HUKUM**

SEJARAH PEMBANGUNAN POLITIK INDONESIA

(1949 – 1955)
→ Demokrasi
Parlementer



(1959 - 1965)
→ Demokrasi
Terpimpin



1998-sekarang
→ Era
Reformasi



(1965 - 1998)
→ Demokrasi
Pancasila

TUJUAN PEMBANGUNAN POLITIK

- 1. Pertumbuhan Ekonomi
Tinggi**
- 2. Pemerataan**
- 3. Demokrasi**
- 4. Stabilitas Nasional**
- 5. Otonomi**

TRILOGI PEMBANGUNAN POLITIK INDONESIA

- 1. Pertumbuhan
Ekonomi Tinggi**
- 2. Pemerataan**
- 3. Stabilitas Nasional**

MASALAH PEMBANGUNAN POLITIK DI INDONESIA

SUPRASTRUKTUR

1. KKN
2. Tidak Efektif Dan Tidak Efisien
3. Kepentingan Ekonomi Politik Kelompok
4. Bermental Penguasa
5. Regulasi Hanya Hiasan

INFRASTRUKTUR

1. Memperjuangkan Kepentingan Kelompok
2. Menjadi Alat Politik Tokoh/Kelompok Tertentu
3. Sarang Oligarki
4. *Money Laundering-money Politics*
5. KKN

MASYARAKAT

1. Antipati/Tidak Kritis
2. Tidak Memahami Nilai Demokrasi
3. Etnosentris
4. Pancasila Tidak Menjadi Budaya Sosial
5. Budaya Koruptif

KONSEP DAN TEORI PEMBANGUNAN POLITIK

AWAL PEMBAHASAN PEMBANGUNAN POLITIK

- ✓ Lahirnya negara-negara baru bekas kolonialisme (PD II), dengan pertanyaan besarnya *bagaimana negara2 baru ini melakukan perubahan politik?? Apa sistem politiknya?? Serta proses pembentukan infrastruktur politiknya??*
- ✓ Berkembangnya studi behavioralisme dalam politik yg mengkombinasikan **kecermatan teoritis dan metodologi untuk meneliti kasus empiris lintas nasional generalisasi universal dan komparatif.**

Fokus pencermatannya menurut Pye :

- ❖ Pada peran media massa dalam mentransformasi sikap, dan pola komunikasi
- ❖ Peran intelektual dalam proses modernisasi

TIPE TEORI PEMBANGUNAN POLITIK

- ✓ Berasosiasi dengan gagasan demokrasi
- ✓ Fokus pada aspek pembangunan dan perubahan politik
- ✓ Menguji krisis dan konsekuensi pembangunan politik

Perwujudan pembangunan politik seiring dengan **pemerintahan yang kuat serta kewenangan yang teratur**

Dengan fokus pertanyaannya berkisar pada : ***derajat kebebasan media massa, sistem partai, kebiasaan pemberian suara, dan standar hidup***

Sementara jika fokus pada demokrasi, maka pertanyaannya berkisar pada : ***sirkulasi kelas sosial, kesejahteraan ekonomi, ekonomi kapitalis, tingkat industrialisasi, tingkat pendidikan, tingkat kesejahteraan, dan prospek penerapan nilai-nilai demokrasi***

ALASAN KEHARUSAN PEMBANGUNAN POLITIK

- ✓ **Krisis Identitas** : berkaitan dengan budaya massa dan elit dalam pengertian perasaan nasionalisme, konflik antarloyalitas etnik dengan komitmen nasional.
- ✓ **Krisis Legitimasi** : berkaitan dengan tumbuhnya perbedaan kewenangan
- ✓ **Krisis Partisipasi** : berkaitan dengan konflik yg terjadi ketika elit yg memerintah memandang pemerintah serta perilaku individu/kelompok tidak memiliki legitimasi
- ✓ **Krisis Penetrasi** : tekanan pada elit yg memerintah untuk melakukan adaptasi dan inovasi terhadap keragaman tertentu
- ✓ **Krisis Distribusi** : berkaitan dengan masalah SDA, SDM, serta lingkungan institusional

Sasaran Dan Pentingnya Pemb. Politik

- Sasarannya : **Negara Berkembang** dan **Negara Terbelakang** → Masih minim **Rasionalitas, Integrasi dan Demokratisasi**
- **Pentingnya Pembangunan Politik** : Karena Politik mempengaruhi dan dipengaruhi oleh aspek **Ekonomi, Sosial, Budaya dan Ideologis**

4 Makna Konsep Pembangunan

MAKNA GEOGRAFIS

Berarti terjadi proses perubahan politik pada Negara sedang berkembang dengan menggunakan konsep dan metode yang pernah digunakan oleh Negara maju. *Ex* : Komunikasi pol, Sosialisasi pol.

MAKNA DERIVATIVE

Dimaksudkan bahwa pembangunan politik merupakan konsekuensi dari proses perubahan yang menyeluruh, yakni modernisasi yang membawa konsekuensi pada pertumbuhan ekonomi, urbanisasi, peningkatan pendidikan, media massa, perubahan status sosial dan aspek-aspek lainnya.

4 Makna Konsep Pembangunan

MAKNA TELEOLOGIS

Teleologis dimaksudkan sebagai proses perubahan menuju pada suatu atau beberapa tujuan dari sistem politik.

Ex: stabilitas politik, integrasi politik, demokrasi, partisipasi, mobilisasi dsb.

Juga pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pemerataan, demokrasi, stabilitas dan otonomi nasional

MAKNA FUNGSIONAL

Makna fungsional diartikan sebagai suatu gerakan perubahan menuju kepada suatu sistem politik ideal yang ingin dikembangkan oleh suatu negara.

Ex: Indonesia ingin mengembangkan sistem politik demokrasi konstutisional dengan amandemen UUD.

4 INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN POLITIK

1. **Penyesuaian-Kekakuan (adaptasi)** : semakin tinggi kemampuan sebuah organisasi beradaptasi maka semakin tinggi tingkat institusionalisasinya.
2. **kerumitan-Kesederhanaan** : semakin rumit organisasi, semakin tinggi kelembagaannya. Kerumitan menghasilkan stabilitas. Organisasi yg sederhana akan hancur dalam proses modernisasi.
3. **Otonomi- Subordinasi** : organisasi politik modern harus bebas dari pengaruh kelompok dan prosedur non politis, serta sistem tradisional.
4. **Keutuhan – Perpecahan** : semakin bersatu dan utuh suatu organisasi politik, semakin tinggi kelembagaannya. Organisasi modern harus ada konsensus fungsional dan prosedur penyelesaian konflik.

Berdasarkan berbagai makna dan indikator pembangunan politik diatas maka dapat disimpulkan bahwa Pemb. Politik merupakan prasyarat politik bagi pembangunan politik itu sendiri, ekonomi, sosial budaya maupun pertahanan-keamanan dsb.

Hampir semua ahli pemb. Politik memahami defenisi pemb. Politik dari apa yang telah digariskan oleh LUCYAN W. PYE (1966) dalam bukunya "*Aspects of Political Development*"
Di dalamnya ada 10 Aspek :

Start on Next Slide..

1. Pembangunan Politik Sebagai Prasyarat Politik Bagi Pembangunan Ekonomi

Sebagian kalangan melihat *jika ekonomi ingin bertumbuh maka kondisi sosial dan politik harus lebih berperan.*

Perannya tidak hanya sekedar menciptakan kestabilan tetapi merangsang pertumbuhan ekonomi dengan membuat kebijakan yg rasional secara ekonomis. Ketika politik hanya berstatus sebagai pelindung, dan membiarkan ekonomi bergerak dinamis didalamnya akan cenderung menciptakan ketimpangan sosial.

Namun dalam kenyataannya, terdapat negara2 yg pertumbuhan politiknya baik, sementara tetap miskin

2. Pembangunan Politik Sebagai Ciri Khas Kehidupan Politik Masyarakat Industri

- ✓ Asumsinya ialah bahwa masyarakat industri melahirkan tipe kehidupan politik (standar/ukuran perilaku politik tertentu) yang dapat ditiru oleh masyarakat manapun, termasuk yang bukan masy. Industri.
- ✓ Tipe kehidupan politiknya sbb :
 1. Pemerintahan yang rasional dan bertanggungjawab,
 2. Menentukan batas2 kedaulatan politik masyarakat.
 3. Penghargaan terhadap nilai-nilai administratif yang teratur dan prosedur hukum.
 4. Pengakuan bahwa politik adalah mekanisme pemecahan masalah.
 5. Penekanan pada program-program kesejahteraan,
 6. Pengakuan terhadap partisipasi massa.

3. Pembangunan Politik Sebagai Modernisasi Politik

- Pembangunan politik yang dicirikan sebagai tipe perilaku masyarakat industri seharusnya dibedakan secara jelas, mana yang dimiliki masyarakat industri mana yang seharusnya dilakukan oleh sebuah bangsa. Karena kenyataannya setiap bangsa memiliki keunikannya masing-masing.
- Namun terdapat nilai-nilai politik universal yang diakui dan diterima secara umum, seperti **partisipasi politik**, namun dampaknya memiliki arti yang berbeda di setiap negara.

4. Pembangunan Politik Sebagai Operasi Negara Bangsa

- Pandangan ini melihat pembangunan politik sebagai politik nasionalisme yang dijalankan dalam kerangka lembaga-lembaga kenegaraan.
- Singkatnya adalah penerjemahan rasa nasionalisme menjadi semangat kewarganegaraan, dan dibentuk lembaga-lembaga negara, yang kemudian mewujudkan aspirasi masyarakat ke dalam program kebijakan atau keputusan.
- Namun pandangan ini kurang menjamin terjadinya pembangunan politik.

5. Pembangunan Politik Sebagai Pembangunan Administrasi Dan Hukum

- Lembaga administratif diciptakan untuk menangani berbagai macam masalah sosial, namun ini tidaklah cukup menciptakan pembangunan politik, jika tidak didukung oleh konsep penegakan administratif yang sesuai dengan aturan hukum. Termasuk *Punishment* dan *Reward* terhadap pelanggar maupun warga negara yang taat.

6. Pembangunan Politik Sebagai Mobilisasi Dan Partisipasi Massa

- Pembangunan politik memang dapat dilihat dari semakin banyaknya rakyat yang partisipatif. Namun over partisipatif akan berbahaya jika berhadapan dengan emosional masyarakat akibat sikap demagog para elit politik.
- Sehingga perlu digelorakannya kesadaran tertib berpolitik secara massal.

7. Pembangunan Politik Sebagai Pembinaan Demokrasi

Demokrasi tidak cukup sampai pada penerapan nilai-nilai demokrasi namun harus adanya pembinaan berupa pendidikan tentang batas-batas bagaimana seharusnya nilai-nilai demokrasi itu dijalankan.

8. Pembangunan Politik Sebagai Stabilitas Dan Perubahan Teratur

- Pembangunan politik tidak semata-mata hanya terciptanya kestabilan belaka, karena itu hanya akan menciptakan stagnansi.
- Oleh karena itu pembangunan politik selain menciptakan kestabilan, namun perlu dilakukannya perubahan yang terencana dan teratur tanpa menciptakan instabilitas.

9. Pembangunan Politik Sebagai Mobilisasi Dan Kekuasaan

- Pengakuan bahwa sistem politik harus bermanfaat bagi masyarakat membawa kita pada pemahaman soal kapabilitas sistem politik.
- Kalau ada argumen bahwa demokrasi akan mengurangi efisiensi sistem politik, berarti tingkat efisiensi politik bisa diukur. Artinya lagi, sistem politik dapat dievaluasi dari bagaimana kekuasaan absolute bekerja memobilisasi.
- Sistem yang tidak stabil akan beroperasi dengan margin kekuasaan yang rendah, dan para pengambil keputusan adalah lembaga-lembaga impotent untuk mampu mencapai tujuan-tujuan politik.

10. Pembangunan Politik Sebagai Satu Aspek Proses Perubahan Sosial Yang Multidimensional

Menurut pandangan ini, *semua bentuk pembangunan saling berkaitan*. Pembangunan banyak persamaannya dengan *modernisasi*, dan terjadi dalam *konteks sejarah* dimana *pengaruh dari luar masyarakat* memengaruhi proses-proses perubahan sosial, persis sebagaimana perubahan-perubahan dalam bidang ekonomi, sistem politik dan tertib sosial saling memengaruhi satu sama lain.



TAHAPAN DAN TANTANGAN PEMBANGUNAN POLITIK

PENDEKATAN PEMBANGUNAN POLITIK

- **PENDEKATAN SISTEM DAN FUNGSI** → Fungsi dapat dirumuskan sebagai hasil dari suatu pola tindakan yg diarahkan bagi kepentingan sistem (sosial maupun politik). **fokusnya** Stabilitas politik, Partisipasi, Pembangunan sistem sosial, pola fungsi dari sistem, dan reaksi tokoh politik terhadap perubahan sistem politik.
- **PENDEKATAN PROSES SOSIAL** → Industrialisasi, Urbanisasi, Komersialisasi, Perluasan pendidikan, Mobilitas kerja, yang dianggap sebagai bagian dari modernisasi dan berpengaruh kuat pada perubahan politik. Fokus perhatiannya pada proses, bukan pada sistem.
- **PENDEKATAN PERBANDINGAN SEJARAH** → Model ini mengarahkan perhatian pada evolusi dua kelompok masyarakat atau lebih

4 TAHAP PEMBANGUNAN POLITIK (*Organsky*)

1. Pembentukan Negara Kesatuan (Politik Unifikasi)

Pada dasarnya bagaimana sebuah negara mampu menciptakan **integrasi** agar stabilitas politik & keamanan stabil sehingga negara menjadi kuat. Seperti konflik etnis, separatisme, penguasa lokal yg menuntut perluasan kekuasaan daripada pemerintah pusat.

Mereka masih disibukan dengan **aktualisasi diri**, bagaimana meningkatkan harga diri, kekuasaan nasional, dan sebagian membicarakan ekonomi yg masih sub sisten.

Pemerintahan yg kurang efisien dan tidak demokratis.

4 TAHAP PEMBANGUNAN POLITIK (*Organsky*)

2. Politik Industrialisasi (Pembangunan Ekonomi)

Keadaan di mana masyarakat berfokus pada ekonomi yang meliputi pekerjaan yang semakin beragam (spesialisasi), gaji, dan penghasilan yang semakin tinggi. Proses industrialisasi merupakan langkah awal menuju modernisasi sistem politik yang berorientasi pada interaksi antara negara dan masyarakat

3 bentuk pemerintahan yg telah melakukan tahap ini dalam sejarah : Borjuis (demokrasi barat), Stalinis (komunisme), dan Fasis.

Prosesnya : peralihan elit tradisional → manajer industri → akumulasi modal → urbanisasi tenaga kerja

4 TAHAP PEMBANGUNAN POLITIK (*Organsky*)

3. Politik Kesejahteraan Nasional

Pada tahap ini industrialisasi bergerak secara nasional dan fungsi pemerintah adalah **melindungi industri, menciptakan iklim usaha dan menyejahterahkan rakyat** berdasarkan pertumbuhan ekonomi yang berhasil dipacu. Pemerintah berkewajiban menetapkan undang-undang kesejahteraan dan mendukung program-program kesehatan, pendidikan, ketertiban sosial dan pengaturan syarat-syarat bekerja, serta bertanggungjawab atas kesejahteraan ekonomi dan sosial warga negara.

4 TAHAP PEMBANGUNAN POLITIK (*Organsky*)

4. Politik Kelimpahan (Otomatisasi)

Pada tahap ini negara telah bergerak ke arah otomatisasi, dimana industri berjalan karena penggunaan teknologi canggih yang dapat menggantikan tenaga manusia. Ancaman yang timbul adalah pengangguran.

Tantangan politik : *pemerintah berhadapan dgn pengangguran (agar tidak digulingkan dan meningkatkan daya beli), terjadi ketergantungan rakyat terhadap pemerintah, dan tuntutan akan perdamaian dunia serta pasar bebas internasional*

Pilihan dari setiap tahap

1. Tahap unifikasi : memilih merdeka atau dibawah jajahan? Memilih nasionalisme sempit atau federasi regional?
2. Tahap industrialisasi : tradisi borjuis atau stalinis yg menuntut percepatan dengan pengorbanan?
3. Tahap kesejahteraan : memilih komunisme, demokrasi massa, atau totaliterisme yg irasional??
4. Tahap otomatisasi

Kritikan atas tahapan organsky :

1. Tidak membahas pengaruh eksternal
2. Pengaruh budaya – penolakan westernisasi

Arah Perkembangan Bangsa Saat Ini

- Menuju industrialisasi
- Produktivitas yg lebih tinggi
- Taraf kehidupan yg lebih baik
- Menuju kompleksitas politik
- Efisiensi politik
- Ketergantungan pada negara yg meningkat

TIPOLOGI PEMBANGUNAN POLITIK

Perubahan Sistem

Yaitu Perubahan pada elemen-elemen sistem secara radikal, karena tidak hanya struktur dan strategi kebijakan yang berubah melainkan sistem politik secara keseluruhan dan mempengaruhi aspek aspek lain.

Perubahan Proses

Politik Lebih menekankan pada perubahan proses politik yang dilakukan dalam sebuah sistem politik.

Perubahan Karena Dampak Kebijakan

Pada dasarnya, sejauh mana kebijakan yang telah dibuat berdampak secara signifikan terhadap kondisi dan kualitas masyarakat

UKURAN PEMBANGUNAN POLITIK (Alfian)

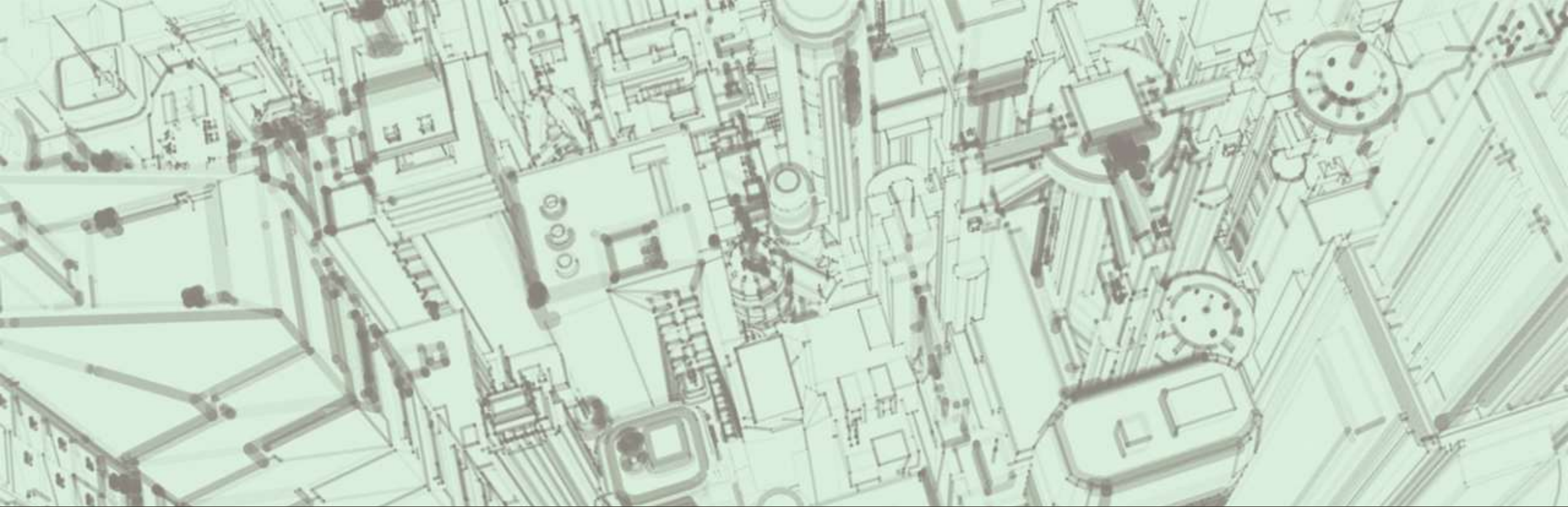
1. **Tingkat ketentraman**, ketertiban dan ketentraman yang dirasakan oleh masyarakat dalam hidup politik sehari-hari
2. **Tingkat kualitas keteraturan hubungan sosial ekonomi** antar warga negara. Sejauh mana hak2nya dilindungi, dan kewajiban mereka diatur dengan baik dan adil.
3. **Partisipasi** : Sejauh mana masyarakat mampu berpartisipasi dalam setiap proses politik
4. **Pengaruh sistem politik** : Sampai mana, sistem politik berpengaruh dalam menaikkan atau bahkan menurunkan tingkat kemakmuran masyarakat

UKURAN PEMBANGUNAN POLITIK

Untuk mencapai kepuasan dalam proses politik, ukuran yang dapat digunakan adalah *political goods* yang meliputi *order and security, welfare, justice and liberty*.

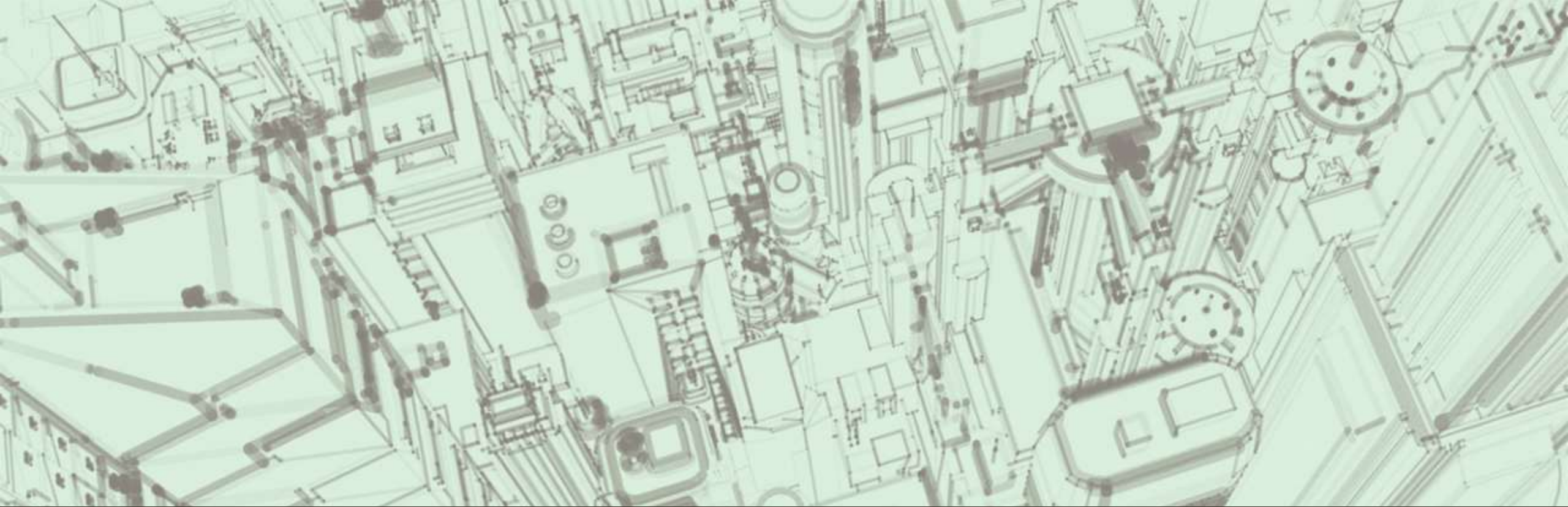
(Sjukur Abdullah, 1980)

1. **Order & Security** : Berkaitan dengan ketentraman dan keamanan masyarakat
2. **Welfare**: Berhubungan dgn tingkat kesejahteraan masyarakat (*Material Welfare* dan *Spiritual Welfare*)
3. **Justice**: Berkaitan dengan penegakkan/ *supreme of law*
4. **Liberty**: Merujuk pada kebebasan masyarakat untuk menentukan segala hal yang berkaitan dengan proses politik



GLOBALISASI & MODERNISASI





MODERNISASI



PENGERTIAN

- Asal kata *modo* artinya cara dan *ernus* artinya periode waktu masa kini.
- Proses perubahan sosial dari masyarakat tradisional menjadi masyarakat modern
- Perubahan peralatan dari sederhana menjadi kompleks
- **Koentjaraningrat** menyatakan modernisasi sebagai usaha untuk hidup sesuai dengan zaman dan konstelasi dunia sekarang.
- **Ogburn** dan **Nimkoff**, modernisasi harus mengarahkan masyarakat agar dapat memproyeksikan diri ke masa depan yang nyata dan bukan angan-angan semu.

PERSAMAAN DAN PERBEDAAN MODERNISASI, WESTERNISASI DAN SEKULARISASI

	Modernisasi	Westernisasi	Sekularisasi
Persamaan	A. Mempunyai Kepentingan Soal Duniawi B. Berasal Dari Barat C. Merupakan Hasil Perbandingan Dari Berbagai Aspek Kehidupan Manusia Yang Dirasionalkan D. Merupakan Proses Perubahan		

	Modernisasi	Westernisasi	Sekularisasi
Perbedaan	<p>A. Mutlak Ada Dan Diperlukan Setiap Negara</p> <p>B. Tidak Mempersoalkan Nilai Keagamaan</p> <p>C. Proses Perkembangan Lebih Bersifat Umum</p>	<p>A. Mutlak Pembaratan</p> <p>B. Tidak Mempertentangkan Antar Kebudayaan Barat Dan Lokal</p> <p>C. Bentuk Barat Sebagai Salah Satu Kemungkinan Satunya</p>	<p>A. Berorientasi Pada Dunia</p> <p>B. Tidak Terikat Pada Niali Agama Dan Bersifat Ilmiah</p> <p>C. Proses Perkembangan Terjadi Dibidang Keagamaan</p>

BENTUK PERUBAHAN DALAM MODERNISASI

***DIRECTED
CHANGE***



ASPEK SOSIAL DEMOGRAFI

Proses perubahan unsur
Sosial, ekonomi dan
Psikologi masyarakat

**ASPEK STRUKTUR
ORGANISASI
SOSIAL**

Proses perubahan dalam
Norma kemasyarakatan
Terwujud dalam interaksi
masyarakat

CIRI, SYARAT, DAN MENTAL MANUSIA MODERN

MANUSIA MODERN

CIRInya:

- Sikap menerima hal baru,
- Memiliki keberanian untuk berpendapat,
- Menghargai waktu dan berorientasi ke masa depan,
- Memiliki perencanaan
- Percaya diri,
- Perhitungan,
- Menghargai harkat martabat orang lain,
- Percaya pada iptek,
- Imbalan harus sesuai dengan prestasi.

SIKAP MENTAL

Kebudayaan masyarakat dapat menjadi pendorong maupun penghambat modernisasi

CIRI, SYARAT, DAN MENTAL MANUSIA MODERN

MANUSIA MODERN

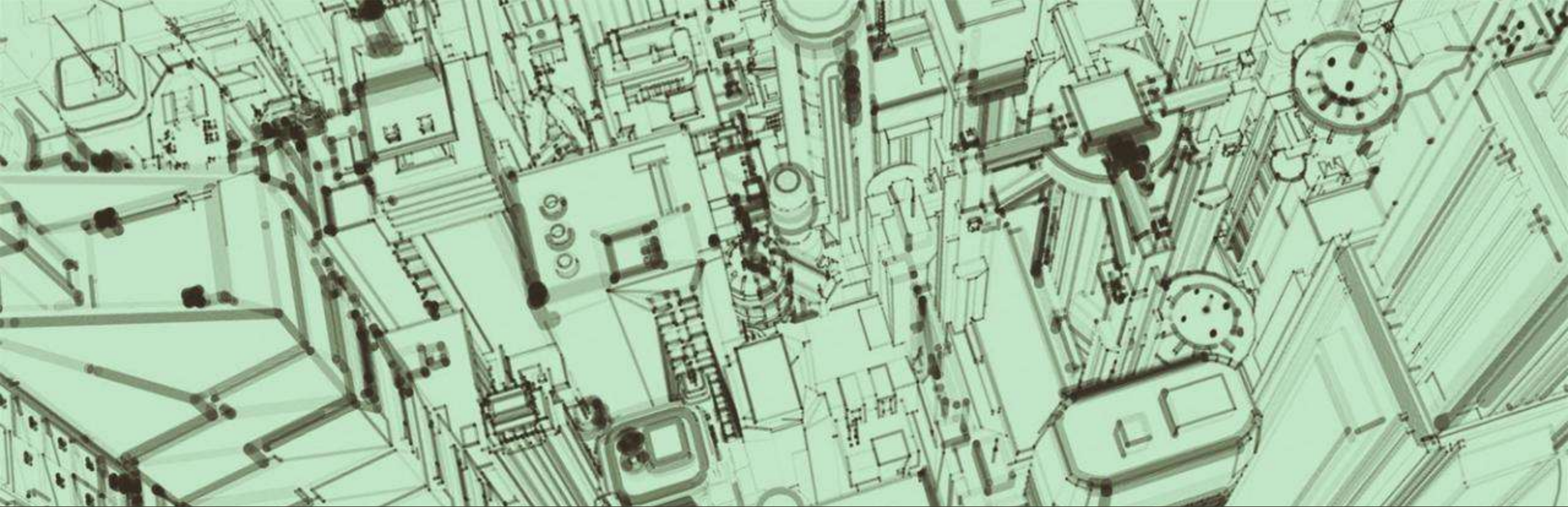


SYARAT MODERNISASI

- Cara berpikir ilmiah yang telah tertanam,
- Sistem administrasi negara yang baik,
- Sistem pengumpulan data baik dan terpusat,
- Iklim yang kondusif terutama media,
- Tingkat organisasi dan disiplin yang tinggi,
- Desentralisasi wewenang

GEJALA MODERNISASI

- **BIDANG BUDAYA:** ditandai dengan makin terdesaknya budaya tradisional oleh budaya baru yang lebih baik
- **BIDANG POLITIK:** semakin banyak negara yang lepas dari jajahannya
- **BIDANG EKONOMI:** semakin kompleks kebutuhan hidup manusia
- **BIDANG SOSIAL:** semakin banyak kelompok sosial baru



GLOBALISASI



PENGERTIAN DAN TEORI GLOBALISASI

Kata "globalisasi" diambil dari kata global, yang maknanya ialah universal.

Ada yang memandangnya sebagai suatu proses sosial, atau proses sejarah, atau proses alamiah yang akan membawa seluruh bangsa dan negara di dunia makin terikat satu sama lain, mewujudkan satu tatanan kehidupan baru atau kesatuan ko-eksistensi dengan menyingkirkan batas-batas geografis, ekonomi dan budaya masyarakat.

Teori globalisasi

- *Globalis positif dan optimis*
- *Globalis pesimis Tradisionalis*

PENGERTIAN DAN TEORI GLOBALISASI

Globalisasi, mengacu pada keberagaman hubungan dan saling keterkaitan antara negara dan masyarakat yang membentuk sistem dunia modern.

Globalisasi adalah proses dimana berbagai peristiwa, keputusan dan kegiatan di belahan dunia yang satu dapat membawa konsekuensi penting bagi berbagai individu dan masyarakat di belahan dunia yang lain A.G.McGrew (1992)

PENGERTIAN KUNCI GLOBALISASI

1. Deteritorialisasi: (de-teritorial), batas geografis ditiadakan.

Ekonomi	Politik	Sosial Budaya
(berikan contoh)	Berikan Contoh	Berikan Contoh

2. Transnasionalisasi: Melewati batas-batas antar negara.

Ekonomi	Politik	Sosial Budaya
(berikan contoh)	Berikan Contoh	Berikan Contoh

PENGERTIAN KUNCI GLOBALISASI

3. Multilokal dan translokal: *Kecenderungan2 besar ke arah globalisasi ini tidak membunuh yang lokal, tetapi justru merangsang dan memperkuat daya hidup lokalitas*

Ekonomiz	Politik	Sosial Budaya
(berikan contoh)	Berikan Contoh	Berikan Contoh

CIRI-CIRI GLOBALISASI

- Perubahan dalam konsep ruang dan waktu.
- Pasar dan produksi ekonomi di negara-negara yang berbeda menjadi saling bergantung
- Peningkatan interaksi kultural melalui perkembangan media massa
- Meningkatnya masalah bersama, misalnya pada bidang lingkungan hidup, krisis multinasional, inflasi regional dan lain-lain.

TEORI GLOBALISASI

Menurut Cochrane dan Pain terdapat 3 posisi teoritis yang dapat dilihat, yaitu:

Mereka percaya bahwa negara-negara dan kebudayaan lokal akan hilang diterpa kebudayaan dan ekonomi global yang homogen.

Para globalis positif dan optimistis → globalisasi akan menghasilkan masyarakat dunia yang toleran dan bertanggung jawab.

Para globalis pesimis → globalisasi adalah sebuah fenomena negatif karena hal tersebut sebenarnya adalah bentuk penjajahan barat (terutama Amerika Serikat) yang memaksa sejumlah bentuk budaya dan konsumsi yang homogen

KRITIK TERHADAP TEORI GLOBALISASI

- ✓ Para tradisional → Globalisasi itu tidak ada. Mereka merujuk bahwa kapitalisme telah menjadi sebuah fenomena internasional selama ratusan tahun. Apa yang tengah kita alami saat ini hanyalah merupakan tahap lanjutan, atau evolusi, dari produksi dan perdagangan kapital.
- ✓ Banyak sejarawan yang menyebut globalisasi sebagai fenomena di abad ke-20 ini yang dihubungkan dengan bangkitnya ekonomi internasional. (Belum tentu benar karena perdagangan internasional sudah berlangsung lama).

MODERNISASI

MODERNISASI

Defenisi

- ❑ Suatu proses perubahan yang menuju pada tipe ideal sistem sosial, ekonomi, dan politik
- ❑ Merupakan perubahan sosial yang tergantung pada tenaga manusia secara sistematis, *ajeg*, mantap dan terarah dalam pengelolaan secara rasional terhadap lingkungan fisik dan sosial manusia demi mencapai berbagai tujuan manusiawi

Defenisi

- ❑ **Ahli ekonomi** : modernisasi sbg bentuk penerapan teknologi oleh manusia utk mengendalikan SDA dalam meningkatkan pertumbuhan per kapita.
- ❑ **Ahli sosiologi dan antropologi** : memandang modernisasi sbg proses diferensiasi sosial.
- ❑ **Ahli sejarah** : fokus pada pertumbuhan ilmu pengetahuan dalam memahami rahasia alam bagi kebaikan manusia
- ❑ **Ahli psikologi** : fokus pada pentingnya orientasi tanggungjawab pribadi, dan prestasi kerja
- ❑ **Ahli pendidikan** : penemuan cara baru dalam berpikir yg memungkinkan manusia utk menciptakan industri, masyarakat, dan pemerintahan modern.

Ahli politik : modernisasi difokuskan pada masalah pembinaan bangsa dalam mendukung sistem politik dan tata cara pemerintahan termasuk meningkatkan kemampuannya utk inovasi dan adaptasi terhadap perubahan dan kebijakan publiknya.

Definisi lain menurut para ahli:

- ❑ Wilbert Moore : Transformasi total dari masyarakat tradisional atau **pramodern** ke tipe **masyarakat teknologi dan organisasi sosial** yang menyerupai kemajuan dunia barat yang **ekonominya makmur** dan **situasi politiknya stabil**
- ❑ Menurut Triyakian : Modernisasi berkaitan dengan **keunggulan inovasi** atau **terobosan kesadaran, moral, etika, teknologi dan tatanan sosial** yang berguna bagi peningkatan **kesejahteraan** manusia.
- ❑ Menurut Chodak : Modernisasi adalah contoh khusus dan penting dari kemajuan masyarakat, contoh usaha sadar yang dilakukan untuk mencapai **standar kehidupan yang lebih tinggi.**

3 Pola Modernisasi Politik (Huntington)

1. **Rasionalisasi Wewenang** : kesetiaan terhadap agama dan dinasti digeser oleh kesetiaan pada negara, negara modern (negara bangsa) mengganti negara feodal, keseimbangan kekuasaan eksekutif dan legislatif, kesatuan organis masyarakat dan pemerintah, penguatan konstitusi, distribusi kekuasaan pluralisme,
2. **Diferensiasi Struktur** : diferensiasi lembaga hukum dan supremasi hukum, kekuasaan dan fungsi politik diperluas, fungsi birokrasi dengan spesifikasi, otonomi pemerintahan daerah, pertahanan negara dikomando militer,
3. **Perluasan Peran Serta Di Bidang Politik** : pemberian hak suara, perwujudan hak dan kekuasaan sipil dalam politik, partisipasi dalam pembuatan keputusan politik

Modernitas dilihat dalam 3 aspek

- ❑ Sebagai dampak semata dari gejala ekonomi → industrialisasi
- ❑ Sebagai serangkaian perubahan sosial dan psikologis yg mengubah baik pola tingkah laku manusia maupun pandangan tradisionil setiap individu
- ❑ Sebagai sebuah perubahan politik baru → perluasan politik, pertumbuhan nasionalisme dsb

Modernisasi mengandung 3 makna:

1. **Paling umum** → seluruh jenis perubahan sosial progresif
2. **Lebih khusus secara historis** → “modernitas” yg berarti transformasi sosial, politik, ekonomi, kultural, dan mental. Modernitas meliputi proses industrialisasi, urbanisasi, rasionalisasi, birokratisasi, demokratisasi, dll
3. **Paling khusus** → hanya mengacu pada masyarakat terbelakang atau tertinggal dan bagaimana upaya mereka untuk mengejar ketertinggalan dari masyarakat yang paling maju yang hidup berdampingan dengan mereka pada periode historis yg sama dalam masyarakat global

SYARAT-SYARAT MODERNISASI

1. Cara berfikir ilmiah
2. Sistem administrasi negara yang baik
3. Adanya pengumpulan data yang baik
4. Penciptaan iklim yang *favourable* dari masyarakat terhadap modernisasi serta alat komunikasi massa sebagai media sosialisasi
5. Tingkat organisasi yang tinggi
6. Sentralisasi sistem

SIKAP MASYARAKAT MODERN (Myron Weiner)

1. Kesiediaan menerima gagasan baru dan mencoba metode-metode baru
2. Kesiagaan untuk menyatakan pendapat
3. Lebih berkepentingan masa kini dan masa yg akan datang daripada masa lalu
4. Lebih teliti mengenal waktu
5. Memiliki kepentingan lebih besar akan perencanaan, pengorganisasian, dan efisiensi
6. Cenderung memandang dunia sebagai sesuatu yang bisa dihitung
7. Yakin akan kemampuan ilmu dan teknologi
8. Percaya akan keadilan distributif
9. Kecakapan dan kreativitas

CIRI-CIRI MODERNISASI

1. Tingkat pertumbuhan ekonomi yang terus berlanjut
2. Kadar partisipasi rakyat dalam pemerintahan yang memadai
3. Difusi norma-norma sekuler-rasional dalam kebudayaan
4. Peningkatan mobilitas dalam masyarakat
5. Transformasi kepribadian individu menjadi kepribadian umum

Perubahan-perubahan Yang Muncul Pada Masyarakat Modern:

Di bidang Ekonomi:

1. Pertumbuhan ekonomi sangat cepat
2. Terjadinya pergeseran dari produksi agraris ke industri
3. Konsentrasi produksi ekonomi di kota dan di kawasan urban
4. Penggunaan sumber daya manusia semakin berkurang
5. Penyebaran temuan teknologi ke seluruh aspek kehidupan sosial
6. Terbukanya pasar tenaga kerja berkompetisi bebas
7. Terkonsentrasinya tenaga kerja di pabrik
8. Pentingnya peran pengusaha dan manajer (kemampuan manajerial)

Di bidang politik:

1. Peran negara semakin besar
2. Mengembangkan pemerintahan berdasarkan hukum
3. Berkembangnya penggolongan warga negara
4. Berkembangnya organisasi birokrasi nasional yang impersonal sebagai sistem manajemen dan administrasi dominan dalam segala aspek kehidupan sosial

Di bidang budaya:

1. Sekularisasi
2. Peran sentral ilmu yang membuka jalan untuk mendapatkan pengetahuan yang benar
3. Demokratisasi pendidikan
4. Munculnya kultur massa

Di bidang kehidupan sehari-hari:

1. Perluasan bidang pekerjaan dan pemisahannya dari kehidupan keluarga
2. Pertumbuhan kemandirian keluarga dan pemisahannya dari kontrol sosial komunitas
3. Pemisahan antara waktu untuk bekerja dan untuk santai (waktu bersantai semakin banyak)
4. Peningkatan konsumerisme

Aspek Modernisasi Yang Berkaitan Dengan Politik

Adanya
mobilisasi
sosial



Perubahan
kebutuhan



Pergeseran
aspirasi

Pembangunan ekonomi berdampak pada perubahan kegiatan ekonomi dan pengeluaran masyarakat

Kemampuan masyarakat meningkat

Proses Modernisasi Politik

- ❑ Rasionalisasi kekuasaan, perubahan pimpinan politik berdasarkan SARA menjadi sekuler
- ❑ Diferensiasi fungsi politik dan pengembangan struktur
- ❑ Adanya peningkatan partisipasi politik

Dampak Negatif Modernisasi Politik

- ❑ Hancurnya pranata politik tradisional.
- ❑ Tumbuhnya kesadaran kelompok → sehingga memunculkan disintegrasi

Dampak Positif Modernisasi Politik

- ❑ Semakin modern kekerasan berkurang
- ❑ Semakin modern sistem politik semakin stabil

Pertimbangan Kritis Atas Dampak Positif Modernisasi

Negara paling miskin belum tentu tidak stabil dan ada kekerasan

Negara berkembang/sedang menuju modern cenderung tidak stabil dan penuh kekerasan

Begitupun sebaliknya, tingkat instabilitas mempengaruhi kualitas modernisasi (Huntington)

BERIKAN CONTOH

Modernisasi Ekonomi Dan Instabilitas

- ❑ Pembangunan ekonomi menghancurkan paguyuban tradisional
- ❑ Orang kaya baru/elit baru *menuntut* status kekuasaan politik sesuai dengan status ekonomi yang dimiliki
- ❑ Melesatnya pendapatan segelintir orang dan menghasilkan banyak orang yang kecewa dengan situasi sosial yang ada.
- ❑ Mobilitas sosial menciptakan alienasi dan ekstrimis politik
- ❑ Kesenjangan sosial
- ❑ Munculnya pembatasan konsumsi massal terhadap kebutuhan pokok.

Modernisasi Ekonomi Dan Instabilitas

- ❑ Melonjaknya aspirasi akibat meningkatnya pendidikan masyarakat
- ❑ Konflik etnis dan regional mengenai masalah investasi dan konsumsi
- ❑ Semakin kompleksnya jumlah organisasi yang memicu semakin beragamnya tuntutan mereka terhadap pemerintah.

TEORI-TEORI PEMBANGUNAN

TEORI EKONOMI KAPITALISME

Penganut teori ini percaya pada :

- Kebebasan individu
- Kepemilikan pribadi
- Inisiatif individu
- Usaha swasta

Pengaruh teori ini pada teori pembangunan lainnya :

- Kebebasan dalam bidang ekonomi → peran pemerintah minim
- Kebebasan pasar → persaingan sempurna
- Ekonomi dapat menyesuaikan diri (*self regulation*)
- Pemenuhan kepentingan pribadi berarti memenuhi kepentingan masyarakat
- Hukum pasar – *supply creates its own demand*

TEORI EKONOMI KAPITALISME

Theory Division Of Labour – Adam Smith

- Pembagian kerja sangat penting
- Buruh adalah sumber kekayaan negara (*wealth of nation*)

Theory Production – Adam Smith

- Produksi ditunjukkan pada pemenuhan konsumsi → motivasi produsen.
- Akumulasi kapital menjadi milik produsen

TEORI EVOLUSI (Agust Comte)

- Teori ini lahir pasca revolusi industri dan revolusi Perancis
- Memiliki 6 asumsi perubahan, bahwa perubahan itu terjadi secara **Natural, Dereksional, Imanen, Kontinyu, Suatu Keharusan, dan Berjalan melalui sebab yang sama**

Fase Perubahan sosial/sejarah manusia melalui fase dibawah ini:

- 1. Fase Theological** → masyarakat dikuasai oleh “pendeta” dan diperintah oleh militer
- 2. Fase Methaphysical** → masyarakat mendasarkan kehidupan pada aspek filosofis
- 3. Fase Scientific** → masyarakat memahami hukum alam dan dan ekspereimentasi ilmiah yg didasarkan pada rasionalitas

TEORI EVOLUSI (Agust Comte)

- Perubahan dari masyarakat sederhana (primitif) menuju masyarakat kompleks (modern/maju) terjadi **secara linear dan dapat dipastikan**
- Teori ini menganggap **tradisionalisme dan konservatisme adalah masalah**, sehingga tujuan masyarakat yg maju, berkemanusiaan dan berkebudayaan adalah tujuan. *(tidak jelas ini tujuan atau nilai)*
- Jika terjadi perubahan yg lambat maka diperlukan **intervensi manusia** dalam perencanaan pengetahuan ilmiah. *Ini menjadi pijakan dasar pemikir modernisasi bahwa perubahan sosial dapat dipercepat dengan rekayasas sosial*

TEORI STRUKTURAL FUNGSIONALISME (Robert Merton Dan Talcot Parsons)

Asumsinya :

- Masyarakat terdiri dari sebuah sistem dengan bagian2 yg saling berkaitan karena adanya konsensus yg selalu berupaya menciptakan *equilibrium* – dicontohkan dengan fungsi organ pada tubuh manusia.
- Perubahan pada satu bagian akan mempengaruhi bagian yg lain, dan terjadi secara integratif, teratur dan mapan. Masyarakat itu dinamis tetapi teratur dan harmoni.
- Konflik sosial dianggap terjadi karena tidak adanya integrasi sosial

Visinya tentang masyarakat modern :

Memiliki hubungan kenetralan, tidak mempribadi dan berjarak, tidak emosional, memiliki hubungan dengan norma universal, dan berorientasi diri sendiri, tumbuh persaingan ketat, orientasi prestasi,

TEORI STRUKTURAL FUNGSIONALISME (Robert Merton Dan Talcot Parsons)

Kritik pada teori ini : mengabaikan bahwa dalam setiap mekanisme dan sistem sosial selalu ada manusia yg diuntungkan dan dirugikan (ditindas, dieksploitas dan didiskriminasi).

Sehingga harmoni tidak tercipta, spesifikasi fungsi tidak tercipta – terjadi pendobelan – yg kuat yg menang.

Analogi Organ dalam tubuh manusia, tidak sesuai karena tidak akan konflik dan kepentingan.

TEORI NEED FOR ACHIEVEMENT (McClelland)

- Bahwa perubahan sosial terjadi karena faktor internal, yaitu kebutuhan akan prestasi, berupa :
 1. Upaya mendorong untuk mengeksploitasi peluang
 2. Upaya meraih kesempatan
 3. Berupaya merubah nasib sendiri
- Motivasi ini lahir dari mimpi yg kemudian melahirkan nafsu utk bekerja secara baik bukan utk pengakuan sosial tetapi utk memuaskan kebutuhan batin sehingga mereka bekerja lebih keras dan lebih cepat
- Manusia tidak *profit oriented* tetapi *achivement oriented*

TEORI NEED FOR ACHIEVEMENT (McClelland)

- Motivasi prestasi ditanamkan sejak kecil, anak dididik menjadi mandiri dan solutif serta bercita-cita yg tinggi, sehingga peran keluarga terutama wanita sangat penting → tugas negara untuk mendoktrin keluarga
- Peran dunia bisnis dalam meningkatkan *N'Ach*
 1. Menaikkan gengsi bisnis sehingga menarik minat pemuda yg memiliki *N'Ach* tinggi utk bergabung
 2. Manajer profesional harus lebih menghargai apa yg diperbuat bukan karena siapa orangnya
 3. Sekolah manajemen haruslah berorientasi *N'Ach* yang tinggi
- Kebudayaan adalah hasil ciptaan manusia ber *N'Ach* tinggi

TEORI PENCIPTAAN TENAGA KERJA (ILO)- PENDY

Karena pertumbuhan tidak serta merta menyelesaikan masalah pengangguran, maka pemerintah harus :

- Mengembangkan proyek di sektor informal : pengembangan pedagang eceran, pedagan kecil, atau pengusaha lemah lainnya
→ UKM
- Pembinaan usaha kerajinan tangan dan industri kecil dengan membangun sentra2 pembinaan manajemen
- Penyediaan modal oleh pemerintah
- Pengkonsentrasian anggaran pada pembelanjaan dan kegiatan penciptaan lapangan pekerjaan

TEORI REDIREKSI INVESTASI (Chenery) - NANDO

Teori ini muncul karena kritik semakin meluasnya jurang ketimpangan

Maka solusi yg ditawarkan adalah :

- Pembentukan modal : orang miskin harus memiliki modal usaha
- Reorientasi arus modal pada usaha skala besar pada investasi yg berhubungan langsung dgn kebutuhan masyarakat miskin seperti kesehatan, pendidikan, kredit dsb.

Dampaknya :

1. Pengaruhi pertumbuhan
2. Produktivitas dan penghasilan orang miskin akan meningkatkan penghasilan seluruh masyarakat

TEORI PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR (Mahbub Ul Haq)

Teori ini berfokus pada upaya memenuhi kebutuhan dasar manusia

→ disebut juga sebagai serangan langsung pada kemiskinan

- Subsidi makanan
- Menurunkan biaya pendidikan dan layanan kesehatan
- Negara maju harus memberikan dan menaikkan bantuan kepada negara miskin yg berfokus pada pemenuhan kebutuhan dasar (makanan, pendidikan, kesehatan dan perbaikan gizi serta peningkatan partisipasi politik)

Strateginya :

Identifikasi kebutuhan dasar → analisis hubungan dan dampak sistem

→ pembentukkan strategi alternatif pemenuhan kebutuhan dasar

Theory Human Resource Development - TIUR

Teori ini berpendapat bahwa revolusi tidak menjadi pilihan negara miskin

Langkah2nya :

- Redistribusi aset produktif – tanah, modal, dsb.
- Pengembangan sumber daya manusia agar mampu mengelola aset produktif
- Pemerintah harus kuat dan efektif dalam mengatasi instabilitas
- Industrialisasi secara intensif – memproduksi barang untuk kebutuhan internasional → tenaga kerja akan terserap
- Distribusi hasil secara merata dan luas

AGRICULTURE FIRST DEVELOPMENT (Mellor)

- Teori ini lahir karena :
 - Peningkatan hasil pertanian dapat berdampak pada meningkatnya daya beli masyarakat
 - Pertanian menciptakan lapangan pekerjaan bagi tenaga kerja

Maka prosesnya antara lain :

- Harus diawali dengan *land reform*
- Perubahan teknologi pertanian (bibit dan pupuk baru, irigasi dsb) harus dijadikan input bagi petani tetapi memang akan menaikkan pembelanjaan produksi petani maka harus ada insentif modal dari negara melalui tabungan domestik, hutang luar negeri, dan peningkatan perdagangan internasional

Karena jika pendapatan petani naik maka mereka akan banyak membeli hasil industri

Tetapi jika pendapatan mereka turun maka hasil tani pasti mahal

PEMBANGUNAN DESA TERPADU (Waterson)

- Teori ini lahir karena kritik terhadap pendekatan pembangunan *top-down* yg tidak menyentuh masyarakat miskin di desa
- Teori ini juga mengkritik pembangunan yg fokus pada pertanian telah menguntungkan petani yg sudah kaya, karena mereka lebih muda mengakses bibit unggul, pupuk baru, dsb
- Cara pembangunan desa yg terpadu antara lain :
 1. Produksi padat karya
 2. Penggunaan surplus tenaga kerja di luar musim pertanian utk membangun infrastruktur
 3. Melahirkan industri pertanian di desa
 4. Memproduksi barang2 *intermediate* dari bahan mentah lokal
 5. *Regional planning* yg disesuaikan dengan hirarki pusat pembangunan utk mengurangi *gap* dengan perkotaan.

THE NEW INTERNATIONAL ECONOMIC ORDER - ALEXSIUS

- Pada kondisi saat ini pembangunan internal negara dunia ketiga harus didukung oleh ekonomi internasional dengan cara :
1. Redistribusi kredit internasional agar negara berkembang mendapatkan modal
 2. Kemudahan fasilitas bagi negara berkembang dalam hal prosesing, transportasi, dan kemudahan ekspor.
 3. Perbesar bantuan luar negeri oleh negeri maju
 4. Restrukturisasi lembaga internasional dengan memberikan kesempatan yg besar bagi negara berkembang utk berbicara

KRITIKAN.....

➤ **Terhadap The new international order :**

1. Teori ini tidak melihat adanya struktur kelas dalam masyarakat negara berkembang (elit mempertahankan *status quo*, mereka akan mempertahankan kemiskinan sbg objek pembangunan, menolak peningkatan pajak, menolak *land reform*)
2. Padat karya hanya akan mempercepat penghabisan SDA

➤ **Terhadap Teori Pemenuhan Kebutuhan Dasar :**

1. Teori ini tidak melihat kebebasan, keamanan, dan partisipasi demokratis sbg kebutuhan dasar
2. Teori ini menguntungkan negara maju karena mengalihkan perhatian negara berkembang dari fokus pada industrialisasi.
3. Konsep padat modal tetap menguntungkan orang kaya karena tidak jelas modal itu dipakai utk memproduksi barang konsumsi internal atau barang untuk ekspor

KRITIKAN.....

➤ **Terhadap Teori Pembangunan Desa Terpadu:**

1. Teori ini menolak urbanisasi dan industrialisasi, padahal tidak semua petani di desa memiliki tanah yang luas yg cukup untuk mendukung produktifitas pertanian sebuah negara.
2. Di kota, masyarakat petani miskin mampu mengakses layanan sosial yg tidak bisa mereka terima jika masih di desa.
3. Industrialisasi seperti di Brazil yg tersebar mampu meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi.

KRITIKAN.....

➤ **Kritikan lainnya :**

1. Land reform tidak mungkin didukung elit kaya
2. Jika pajak dan pembelanjaan negara utk pemeratakan pendapatan dapat menyebabkan pemogokkan modal seperti yg terjadi di Chile.
3. Pembangunan yg fokus pada padat karya melalui eksplorasi SDA seperti yg terjadi di mayoritas negara berkembang hanya akan menjadi masalah bagi masyarakat miskin.

SOLUSINYA

1. **Penyadaran kaum elit**
2. **Revolusi sosial**
3. Redistribusi kekayaan dan pendapatan
4. Reorientasi terhadap produksi untuk memenuhi kebutuhan massa
5. Akses yang adil terhadap pelayanan sosial



**GOOD GOVERNANCE
&
BIROKRASI**

Good Governance Dan Demokratisasi

❖ Gelombang Demokratisasi :

- ✓ Gelombang 1: (1820-an – 1918) : Nasionalisme dan kegagalan Modernisasi I. Memperoleh manfaat pada masa pencerahan
- ✓ Gelombang II ((1945 – 1962): dekolonisasi dan kegagalan modernisasi yang kedua.
- ✓ Gelombang III: (1974 – sekarang). **Menyatunya Ekopolin**

- ❖ Demokratisasi Di Indonesia tahun 1990 -1998 setelah reformasi
- ❖ GG sebagai manifestasi dari demokrasi partisipatoris.

KONSEP Good Governance

Government : *the authoritative direction and administration of affairs of man and women in nation, state and city* → **Pengaturan dan pengelolaan , pengurus**

Governance : *the act, fact and manner of governing*

- ❖ Proses interaksi antara masyarakat dan pemerintah dan intervensi pemerintah
- ❖ Penggunaan otoritas, politik ekonomi dan administrasi dalam pengelolaan pemerintah

Pengertian Good Governance

The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) and World Bank: Penyelenggaraan pembangunan yang *solid* dan *bertanggung jawab* : sejalan dengan demokrasi dan pasar yang *efisien*, hindarkan salah alokasi, tidak korup, disiplin anggaran, dalam kerangka kerja politik dan hukum, tumbuhkan kewiraswataan

UNDP : Pelaksanaan kewenangan politik, ekonomi administrasi dalam mengelola masalah bangsa

Ruang Lingkup Good Governance :

- State
- Private
- Society

Governance mencakup:

- Konsensus antara ketiganya
- Dialog dan saling memahami

Ciri Good Governance :

1. Interaksi: *State-private-society*
2. Transparan, bertanggung jawab, dan interdependensi
3. Kemandirian masyarakat dan keterkaitan antar unsur di dalamnya yg dinamis dan harmonis
4. Efektif dan adil
5. Supremasi hukum
6. Adanya Prioritas politik sosial
7. Keberpihakan alokasi sumberdaya kepada yang lemah.

Komponen Kerja GG

1. **Political Governance** :
Policy Making
(Legislation)
2. **Economic Governance** :
Policy Making Yang
Memfasilitasi
Governance
3. **Administrative** :
Implementasi Kebijakan
(State-private- Society)

Parameter Kerja GG

1. **Hukum / kebijakan** : perlindungan terhadap kebebasan dalam politik, ekonomi, sosial, dan budaya.
2. **Kompetensi administrasi dan transparansi** : kemampuan dan perencanaan dan implementasi, efisiensi dan keterbukaan informasi
3. **Desentralisasi** : adanya distribusi kekuasaan berupa pembagian, dan pemisahan
4. **Penciptaan pasar** yang kompetitif, deregulasi, mendorong *Ease Doing Of Bussiness*

Prinsip Utama Good Governance

1. **Pertanggunggugatan Politik** : Penggantian pejabat secara berkala (tidak mono-loyalitas)
2. **Pertanggunggugatan Publik** : *Subject to control and public monitor*
3. **Transparansi**
 - ❖ *Checks and ballances*
 - ❖ Setiap kebijakan bisa diakses
 - ❖ Kebijakan yang terbuka terhadap pengawasan
 - ❖ Partisipasi dalam aspirasi langsung oleh masyarakat dan terlibat dalam pengambilan keputusan
4. **Supremasi hukum**; kejelasan dan prediktabilitas (kepastian)

Kendala Penerapan Good Governance

Internal :

- Demokratisasi meningkatkan tuntutan rakyat
- Disiplin
- KKN masih tinggi
- Kelembagaan
- Rendahnya efisiensi (seharusnya dipangkas)
- Partisipasi prosedural (hanya pada pemilu)

Eksternal :

- Ketidakpastian perubahan
- Revolusi teknologi
- Kompetisi pasar didominasi oleh pelaku besar (*big fish*)

Kendala Kendala Penerapan GG di Indonesia Menurut Miyasto

1. **Pemerintah masih dominan** (sentralistik, rendahnya partisipasi masyarakat)
2. **Lemahnya kontrol** : terutama oleh DPR/DPRD dan lembaga inspektoral lain (BPK, BPKP)
3. **Transparansi masih belum berjalan**

La Palombara *“perubahan-perubahan besar yang terjadi di negara maju dan berkembang tidak lepas dari intervensi yang masif dari pemerintah”.*

Intervensi pemerintah melalui birokrasi yg adalah sektor publik yang bertanggungjawab terhadap transformasi.

Karena birokrasi merupakan lembaga yang profesional, tehnikal dan memiliki sumber daya enterpreneur yang dimilikinya dapat dijadikan sebagai media perubahan masyarakat.

**PERAN
BIROKRASI
DALAM
MELAKUKAN
PERUBAHAN
SOSIAL**

Birokrasi

Birokrasi → *Bureau* = Meja tulis

Cracy = berasal dari kata *Kratein* yg berarti mengatur

Bureaucracy menunjuk pada prosedur-prosedur administrasi, menyangkut aspek institusional dan asosional dari pemerintah

Fungsi birokrasi adalah menyelenggarakan tugas yang ditentukan oleh konstitusi, menjalankan program pembangunan, pelayanan publik dan kebijakan pemerintah.

BIROKRASI WEBERIAN

1. Bersifat impersonal → memisahkan antara pribadi dan kepentingan umum.
2. Adanya hirarki Fungsi-fungsi jabatan ditentukan secara tegas.
3. Para pejabat diangkat berdasarkan kontrak.
4. Memiliki kualifikasi profesional.
5. Memiliki gaji berjenjang menurut kedudukan dan hirarki dan hak pensiun.
6. Tunduk pada kontrol yang seragam dan sistem disipliner

Mekanisme Birokrasi Weberian

1. **Kolegalitas** : setiap tahapan jabatan dimiliki oleh 1 orang yg memiliki tanggungjawab mengambil keputusan.
2. **Pemisahan kekuasaan** : pembagian tugas dalam fungsi yg relatif berbeda, namun harus ada kompromitas antara lembaga
3. **Administrasi amatir** : gaji tidak menjadi ukuran capaian pegawai administratif, namun kepercayaan umum.
4. **Demokrasi langsung** : pejabat yg bertanggungjawab pada majelis tertentu yg memilihnya, masa jabatan yg singkat, kemungkinan *recall*
5. **Representasi** : perwakilan kolegiat melalui pemungutan suara, dan pengambilan keputusan bersama2 dengan orang yg memilih

BIROKRASI MARXIS

1. Birokrasi = pemerintahan negara
2. Dimanfaatkan oleh kelompok dominan yg partikular
3. Birokrasi mengonsolidasikan fungsi dominatifnya → imperialisme birokrasi
4. Kurang inisiatif dan imajinasi serta tidak berani mengambil risiko pertanggungjawaban

BIROKRASI HEGELIAN

1. Birokrasi = penghubung kepentingan masyarakat (umum) dengan kepentingan pemerintah (partikular)
2. Adanya aktivitas reguler
3. Cara yang baku/kewajiban resmi
4. Hirarkis
5. Menjalankan tugas berdasarkan impersonalitas formalistis

3 Perspektif Tentang Birokrasi

Perspektif Politik : Badan pemerintah bagian dari sistem politik atau kepanjangan tangan dari pihak (*partai*) berkuasa, cenderung memihak (*kepentingan penguasa dan rakyat*), memiliki kewenangan, terlibat dalam perencanaan kebijakan/keputusan politik, dan dapat menjadi organisasi mobilitas massa.

3 Perspektif Tentang Birokrasi

Perspektif Administrasi Publik :

Badan atau Organisasi Pemerintahan yang Melaksanakan Layanan Publik yang Profesional, Efektif, Efisien, dan Produktif. Birokrasi Mesti Melaksanakan Tugas sesuai Aturan, Cepat, Tepat, Mudah, Murah, dan Menghasilkan.

3 Perspektif Tentang Bimlcrisi : Badan

pemerintah yang melaksanakan fungsi-sungsi manajemen pemerintahan (*perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, koordinasi, resolusi konflik, dll*), penetapan kebijakan publik, bersikap netral dan profesional, melaksanakan etika birokrasi dan tata pemerintahan yang baik (*transparansi, akuntabilitas, dan*

partisipatif)

Masalah Birokrasi Di Indonesia

1. Korupsi birokrasi
2. Penyimpangan arah dan kinerja
3. Manipulasi anggaran
4. Sikap feodal para pejabat birokrasi
5. Politisasi birokrasi
6. Mengulur waktu/berbelit
7. Pungutan liar
8. Mental bapak senang

Bagaimana menjalankan sistem birokrasi di Indonesia dengan masalah2 yang dimilikinya agar dapat mencapai predikat *Good Governance*?



MOBILITAS SOSIAL

DEFENISI MOBILITAS SOSIAL

- ❖ Mobilitas berasal dari bahasa latin ***mobilis*** yang berarti mudah dipindahkan atau banyak bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain.
- ❖ Kata sosial yang ada pada istilah tersebut mengandung makna gerak yang melibatkan seseorang atau sekelompok warga dalam kelompok sosial.

*Jadi, **mobilitas sosial** adalah perpindahan posisi seseorang atau sekelompok orang dari lapisan yang satu ke lapisan yang lain.*

DEFENISI MOBILITAS SOSIAL

- ❖ Mobilitas → perubahan
- ❖ Hidup manusia → bergerak dinamis
- ❖ Semakin terbuka suatu masyarakat, semakin memungkinkan pula terjadinya mobilitas sosial.

Mobilitas sosial bermakna 3 hal pokok :

- a. Perubahan kelas sosial, baik ke atas maupun ke bawah.
- b. Dialami oleh manusia sebagai individu maupun kelompok.
- c. Terjadi dampak sosial terhadap kelas sosial baru yang diperoleh individu atau kelompok

DEFENISI MOBILITAS SOSIAL

- ❖ **Paul B. Horton**, *mobilitas sosial adalah suatu gerak perpindahan dari satu kelas sosial ke kelas sosial lain atau gerak pindah dari strata yang satu ke strata yang lain.*
- ❖ **Kimball Young dan Raymond W, Mack**, *mobilitas sosial adalah suatu gerak dalam struktur sosial yaitu pola-pola tertentu yang mengatur organisasi suatu kelompok sosial. Struktur sosial mencakup sifat hubungan antara individu dalam kelompok dan hubungan antara individu dengan kelompoknya.*

**Perpindahan Individu
Atau Obyek Sosial
Dari Kedudukan
Sosial Ke Kedudukan
Sosial Lainnya Yang
Tidak Sederajat**

Jenis
Mobilitas
Sosial

Vertikal

Vertikal Ke
Bawah

Turunnya
Kedudukan

Turunnya Derajat
Kelompok

Vertikal Ke
Atas

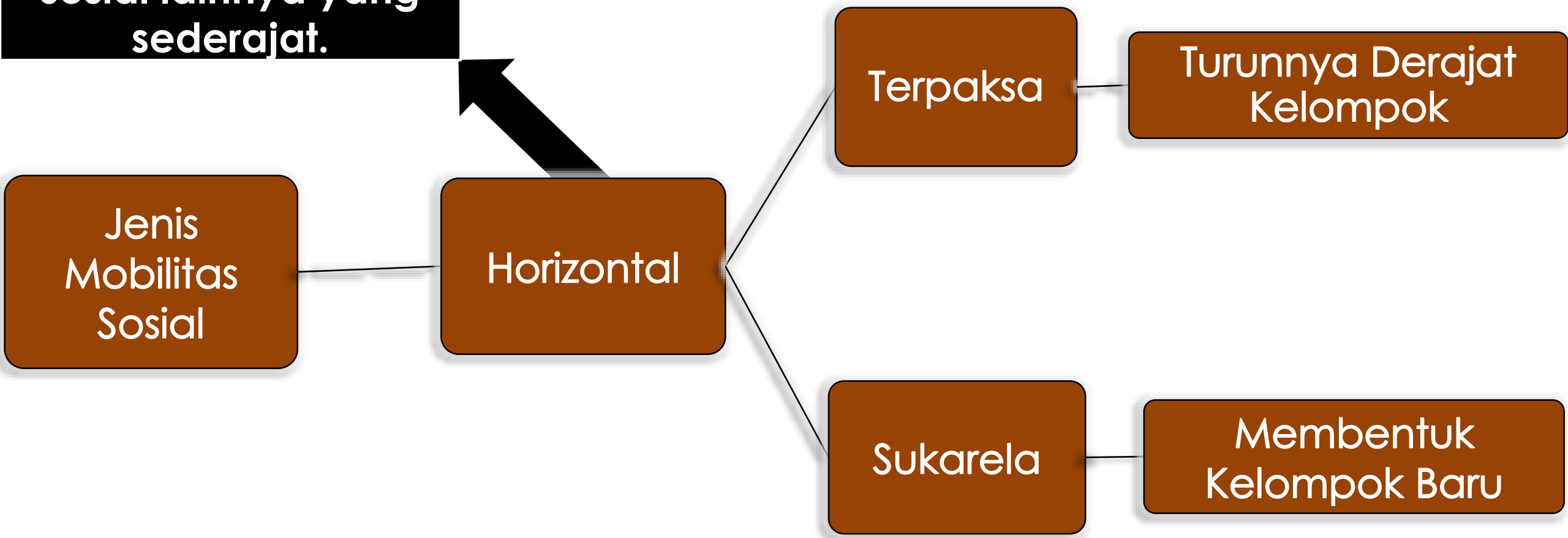
Peralihan Kedudukan
Dalam Kelompok
Yang Sama

Membentuk
Kelompok Baru

PRINSIP-PRINSIP MOBILITAS SOSIAL VERTIKAL

1. Tidak ada masyarakat yang sistem pelapisannya tertutup, sehingga tidak ada mobilitas sosial vertikal
2. Meskipun sistem pelapisan sosial terbuka, tidak mungkin mobilitas sosial vertikal dilakukan secara bebas
3. Mobilitas sosial vertikal yang umum berlaku bagi semua masy. Tidak ada
4. Mobilitas sosial yang disebabkan faktor ekonomi, politik serta pekerjaan berbeda
5. Mobilitas sosial karena faktor ekonomi, politik serta pekerjaan tidak ada yang kontinyu.

Perpindahan individu atau obyek sosial dari suatu kelompok sosial ke kelompok sosial lainnya yang sederajat.



Tingkat Mobilitas Sosial → Berdasar Sifat Stratifikasi Sosial

1. Masyarakat dengan **sifat Stratifikasi Sosial Terbuka**
2. Masyarakat dengan **sifat Stratifikasi Sosial Tertutup**

Faktor Penghambatnya :

1. Perbedaan Kelas Rasial
2. Agama
3. Diskriminasi Kelas
4. Kemiskinan
5. Perbedaan Jenis Kelamin

Faktor Pendukung Mobilitas Sosial

- Perubahan Kondisi Sosial
- Ekspansi Teritorial Dan Gerak Populasi
- Komunikasi Yang Bebas
- Pembagian Kerja
- Tingkat Fertilitas (Kelahiran) Yang Berbeda
- Situasi Politik

2 Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Mobilitas Pada Masyarakat Modern

FAKTOR STRUKTURAL → jumlah yang relatif kecil dari kedudukan tinggi yang bisa dan harus diisi serta kemudahan/kesulitan untuk memperolehnya.

FAKTOR INDIVIDU → kualitas orang per orang (pendidikannya, ekonomi, penampilan, keterampilan, dll)

Contoh : Ketidakseimbangan jumlah lapangan kerja yang ada dibandingkan dengan jumlah pelamar atau pencari kerja

DAMPAK MOBILITAS SOSIAL

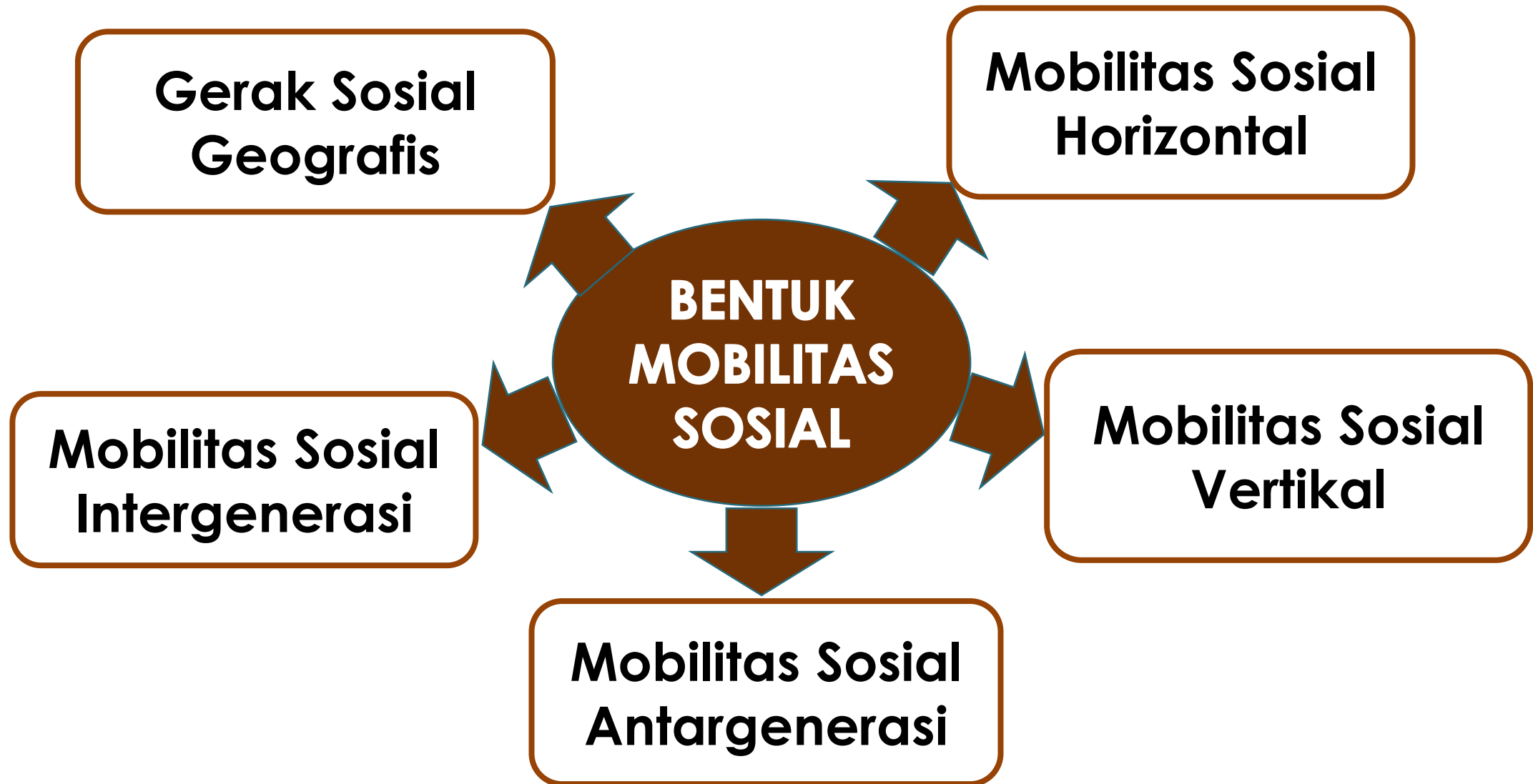
```
graph TD; A[DAMPAK MOBILITAS SOSIAL] --> B[Negatif]; A --> C[Positif]; B --> D["Konflik Antar Kelas, Konflik Antar Kelompok Sosial, Konflik Antargenerasi, Penyesuaian Kembali"]; C --> E["Prestasi Jadi Prioritas, Mempercepat Kemajuan Sosial,"];
```

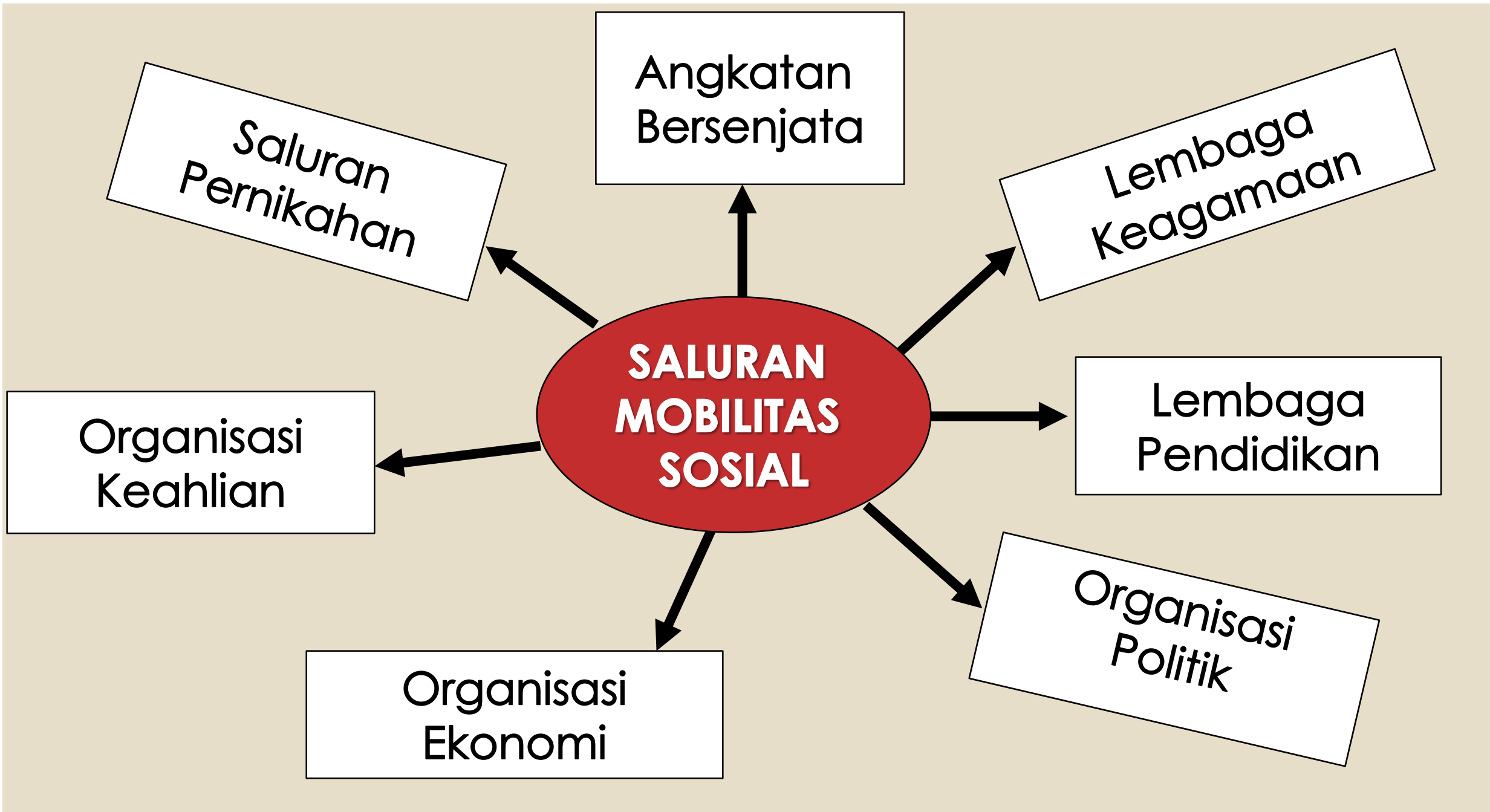
Negatif

Konflik Antar Kelas, Konflik Antar Kelompok Sosial, Konflik Antargenerasi, Penyesuaian Kembali

Positif

Prestasi Jadi Prioritas, Mempercepat Kemajuan Sosial,







MILITER DAN POLITIK

RELASI MILITER DAN POLITIK

- ❑ Sistem politik demokrasi senantiasa mengajarkan doktrin “**supremasi sipil**” – politisi sipil harus mengendalikan militer (sebagai bagian birokrasi yang profesional);
- ❑ Ketidakefektifan pemerintahan sipil – terlalu banyak pertikaian politik dan instabilitas, terutama negara demokrasi baru – tak jarang menggoda militer untuk mengambil-alih kekuasaan politik, termasuk melalui kudeta;
- ❑ Besar-kecilnya peran politik militer berbanding terbalik dengan lemah-kuatnya konsolidasi demokrasi.

TIPOLOGI MILITER POLITIK MENURUT ERIC NORDLINGER

	MODERATORS	GUARDIANS	RULERS
KEKUASAAN YANG DIMILIKI	Kekuasaan veto	Kontrol pemerintahan	Dominasi rezim
TUJUAN EKONOMI DAN POLITIK	Melindungi status quo	Melindungi status quo dan mengoreksi kesalahan serta pemborosan	Memengaruhi perubahan politik dan perubahan sosial-ekonomi

HUBUNGAN MILITER DENGAN KEKUASAAN POLITIK MENURUT AMOS PERMUTTER

- ❑ **Autokratik Praetorian (*The Personalist*)** : tentara mendukung satu orang yang sangat berkuasa dalam satu negara;
- ❑ **Oligarki Praetorian** : secara struktural kekuasaan dikendalikan oleh sejumlah orang yang didukung oleh militer;
- ❑ **Korporatis Praetorian** : sistem kekuasaan politik didasarkan pada korporatisme dan klientilisme.

KARAKTERISTIK MILITER

TENTARA SEBAGAI PENENGAH (ARBITRATOR), sifat intervensi saat terjadi konflik, selesai mengelola konflik kekuasaan dikembalikan kepada sipil: Disebut juga sebagai Pretorian Moderator: memiliki kekuasaan veto terhadap sejumlah keputusan pemerintah, namun tidak mengendalikan sendiri pemerintahan.
Contoh: Negara Mesir dalam pengaruh Arab Springs.

TENTARA SEBAGAI PEMERINTAH (THE RULE ARMY), sifat ambisi kuat menguasai negara, mengandalkan kekerasan, mengambil alih kekuasaan pemerintah, untuk mengatasi suatu krisis dan dalam jangka waktu tertentu. Setelah krisis dapat diatasi, mereka membentuk pemerintahan sipil dan mengundurkan diri dari kegiatan pemerintahan.
Contoh: Negara Thailand di era 1970-1990-an/ dan kurun waktu tertentu.

MILITER ORGANISASI HIRARKIS,

kurang kohesif, kesadaran kolektif tinggi, ideologi materialis dan anti sosialis dan intervensionis.

- Disebut juga *Para Ruler*: memegang kekuasaan yang luar biasa, memiliki program politik– ekonomi serta memandang dirinya sebagai modernisator atau revolusioner.
- *Contoh: Libya di era Moammar Khadafi, Turki di Era Pemerintahan Militer dan Indonesia di Era Rejim Soeharto.*

MILITER REVOLUSIONER;

Keberadaan didasarkan pada kebutuhan kekuatan fisik dalam revolusi merebut kemerdekaan, atau intervensi musuh pada wilayah. Tentara tampil sebagai alat mobilisasi partai yang revolusioner. Tentara memiliki hubungan simbolik dengan revolusi, organisasi ketentaraan mengalami proses politisasi dari partai revolusioner.

- *Contoh: Militer di Negara RRC (Tentara Merah dan tentara Pembebasan Rakyat Cina).*

MILITER PRETORIANISME REVOLUSIONER (*PRAETORIAN REVOLUTIONERY ARMY*);

Suatu postur militer yang lahir dan berkembang dalam lingkungan politik yang tidak stabil meskipun asal-usulnya adalah berasal dari suatu sistem politik baru atau suatu sistem politik yang sedang merosot yang tidak stabil.

→ *Contoh : Militer di Indonesia (TNI) dan Angkatan Perang di Aljazair*

Perang Kemerdekaan dan Demokrasi Liberal (1945-1957) militer (ABRI/TNI) hanya memiliki peranan yang bersifat ***influence***.

Dalam masa krisis militer bergerak pada posisi ***moderator***, seperti pada peristiwa 17 Oktober 1954, peristiwa 27 Juni 1955.

Dalam masa rezim Soeharto militer bergerak ke posisi ***para ruler*** dengan konsep Dwi Fungsi ABRI Orde Baru.

MILITER PROFESIONAL

Muncul di Eropa, khusus dalam revolusi Perancis tahun 1799. Profesi militer merupakan contoh menarik dari profesionalisme organisasi yang otonom, merupakan ekspresi dari tipe sosial baru. Terdiri atas para individu yang bukan kapitalis dan bukan buruh, juga bukan administrator pemerintahan dan birokrasi *ansich*.

CIRI MILITER PROFESIONAL

1. Menyangkut keahlian sehingga profesi di bidang kemiliteran kian menjadi spesifik serta memerlukan pengetahuan dan ketrampilan.
2. Berkaitan dengan tanggung jawab sosial yang khusus, memiliki nilai-nilai moral yang tinggi terpisah dengan insentif ekonomi dan tanggung jawab kepada negara.
3. Memiliki karakter korporasi (*corporate character*) melahirkan rasa *esprit de corps*.

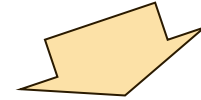
HUBUNGAN SIPIL – MILITER

MENURUT SAMUEL HUTINGTON

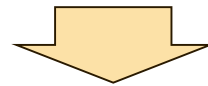
1. ***Subjective Civilian Control*** : maksimalisasi kekuasaan sipil atas militer, dengan kontrol sipil atas lembaga-lembaga pemerintahan, kelas-kelas (organisasi) sosial, dan aturan-aturan konstitusional (prosedural).
2. ***Objective Civilian Control*** : kontrol sipil atas militer dilakukan melalui pemaksimalan profesionalisme militer. Selain militer merasa diakui dan dihargai perannya, militer profesional dengan sendirinya akan menjauhi politik.

KARAKTERISTIK KONTROL OBJEKTIF

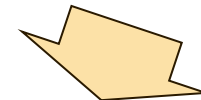
Ada pengakuan kurangnya kompetensi profesional, dan disadari perlunya **ditingkatkan untuk mencapai standar profesional tingkat tinggi**



Subordinasi efektif militer terhadap kepemimpinan sipil tentang kebijakan luar negeri dan militer;



Pengakuan atas kepemimpinan **profesional dan otonomi militer;**



(Implikasinya) **Minimalisasi intervensi militer dalam politik dan intervensi politik dalam militer.**

KARAKTERISTIK MILITER DALAM POLITIK

- ❑ Idiom *Gun VS Butter*
- ❑ Tentara Pejuang VS Tentara Profesional
- ❑ Tentara Penyelamat Negara VS Tentara Penjaga Kedaulatan Negara
- ❑ 'Tentara Berbaju Sipil', 'Pasukan Bedah Besi', 'Birokrat Bersenjata'
- ❑ Klaim Historis VS Amanat Rakyat

Lebih dua pertiga negara di Amerika Latin, asia, Timur Tengah, Dan Afrika terbelenggu oleh campur tangan militer sejak tahun 1945

KARAKTERISTIK MILITER DALAM POLITIK

GUN VS BUTTER

Problematika negara-negara, khususnya negara dunia ketiga tentang apakah memenuhi anggaran militernya terlebih dahulu atau kesejahteraan masyarakatnya;

- Dilema tersebut memicu intervensi tentara ke dalam ranah politik melalui berbagai pola, dari mempengaruhi hingga mengambil kekuasaan melalui jalan kudeta. Hingga tentara memiliki bisnis. (**Gun**)
- Ada kecenderungan untuk mendorong terjadinya *distrust* masyarakat terhadap pemerintah sipil agar tentara dapat melakukan pengambilalihan kekuasaan mengatasnamakan masyarakat dan penyelamatan negara (**Butter**)

KARAKTERISTIK MILITER DALAM POLITIK

TENTARA PEJUANG VS TENTARA PROFESIONAL

- Adanya peraturan di sebagian perwira militer tentang betapa besarnya peran tentara dalam memperjuangkan kemerdekaan.
- Adanya keinginan untuk tetap mengabdikan dan berkarya dalam pemerintahan sebagai bagian dari kelanjutan

- Tentara yg fokus pada masalah keamanan dan eksistensi negara
- Transisi dari tentara pejuang menjadi tentara profesional berjalan lambat, hal ini disebabkan karena ketidakinginan internal militer untuk berubah.

TENTARA PENYELAMAT NEGARA

- Eksistensi negara sebagai tujuan dari militer.
- Adanya perasaan yang bergelora di sebagian besar anggota militer untuk menyelamatkan negara dari perpecahan dan keterpurukan saat negara dalam keadaan kritis.
- Atas nama menyelamatkan negara, militer dapat mengambil kekuasaan dengan berbagai cara, dan berupaya memegang kekuasaan tersebut selama mungkin.

PENJAGA KEDAULATAN NEGARA

- Secara profesional militer suatu negara memiliki fungsi sebagai penjaga kedaulatan negara dari ancaman luar. Militer memiliki kewajiban bersama masyarakat untuk menjaga setiap jengkal wilayahnya dari kemungkinan invasi dan ancaman yang datang dari luar, maupun dalam.

TENTARA BERBAJU SIPIL

- Prajurit atau perwira yang memegang kekuasaan politik dengan mengganti seragam dan lencanaanya dengan pakaian sipil.

PASUKAN BEDAH BESI


- Bentuk legitimasi dari campur tangan militer dengan suatu tindakan tegas yang diperlukan untuk memulihkan suasana politik & ekonomi.

BIROKRAT BERSENJATA

- Julukan kepada rezim militer karena sikap politik dan cara pemerintahannya nyaris mirip dengan pola pemerintahan sipil.



INTEGRASI NASIONAL



Menurut David Lockwood, **Konsensus** Dan **Konflik** merupakan dua sisi dari suatu kenyataan yang sama dan dua gejala yang melekat secara bersama-sama di dalam masyarakat.

Menurut R. William Liddle, masyarakat akan berintegrasi dalam bentuk **Konsensus nasional** antara lain :

- Anggota suku bangsa bersepakat tentang batas-batas territorial dari negara
- Anggota masyarakat bersepakat mengenai struktur pemerintah dan aturan-aturan dari proses politik yang berlaku bagi seluruh masyarakat di atas wilayah negara yang bersangkutan.

Kemudian, suatu consensus nasional mengenai "system nilai" yang akan mendasari hubungan-hubungan social di antara anggota suatu masyarakat negara.

PENTINGNYA INTEGRASI NASIONAL

- Negara berkembang cenderung mengalami ketidakstabilan → konflik kepentingan, SARA, elit dan pengikut, dll
- Negara yang senantiasa diwarnai konflik akan sulit untuk mewujudkan kemajuan.
- Integrasi masyarakat yang sepenuhnya memang sesuatu yang tidak mungkin diwujudkan, karena setiap masyarakat disamping membawakan potensi integrasi juga menyimpan potensi konflik atau pertentangan.
- Integrasi nasional menjadi modal kuat untuk membangun kejayaan nasional demi mencapai tujuan nasional.

KONSEP INTEGRASI NASIONAL

Integrasi Nasional adalah upaya menyatukan seluruh unsur suatu bangsa dengan pemerintah dan wilayahnya.


“Mengintegrasikan” berarti membuat untuk atau menyempurnakan dengan jalan menyatukan unsur-unsur yang semula terpisah-pisah.

Integrasi nasional adalah usaha dan proses mempersatukan perbedaan-perbedaan yang ada pada suatu negara sehingga terciptanya keserasian dan keselarasan secara nasional.

KONSEP INTEGRASI NASIONAL

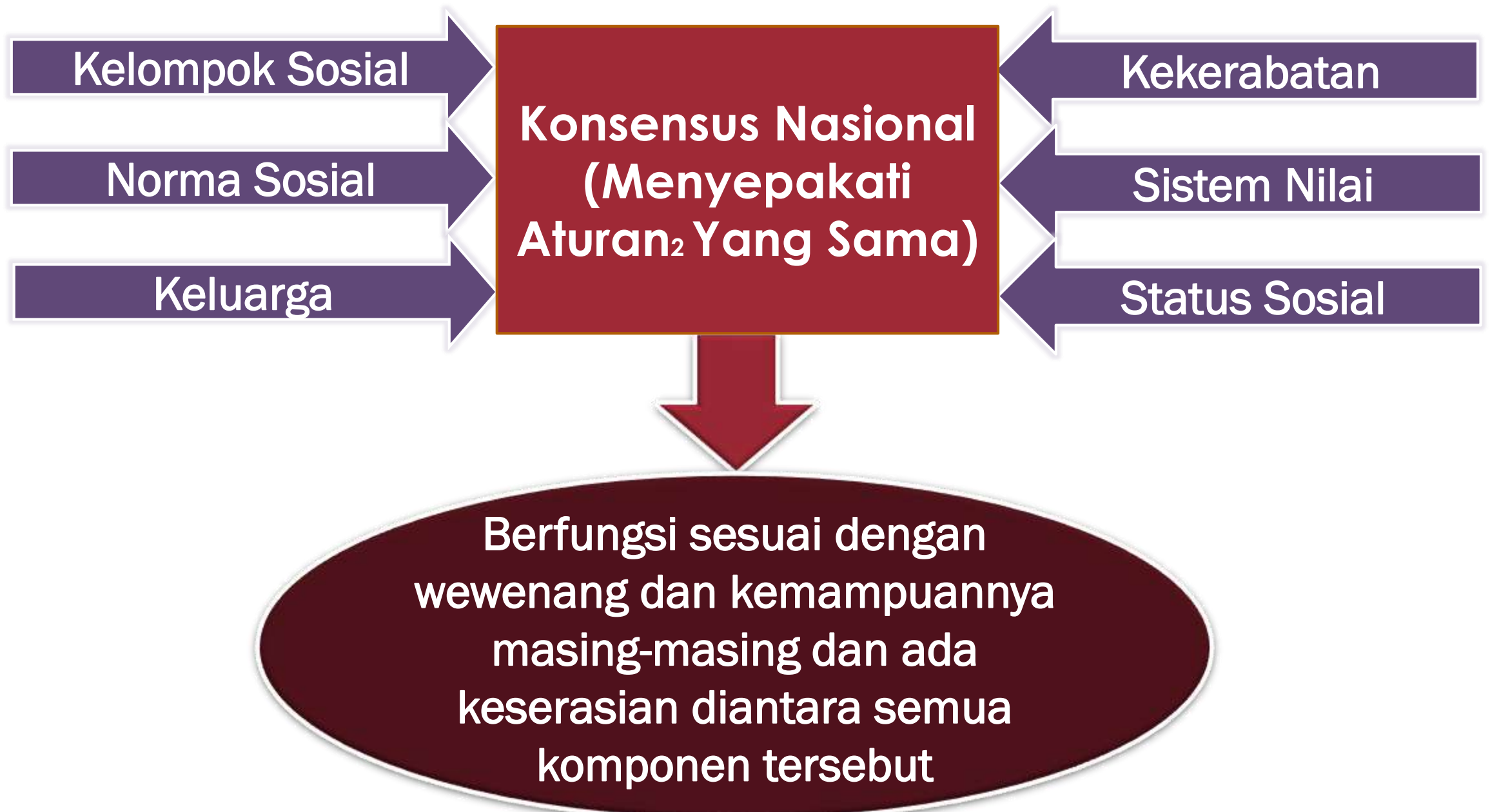
Integrasi → *integration* = kesempurnaan atau keseluruhan.
Integrasi yang dimaksud disini merujuk pada upaya penyatuan berbagai kelompok masyarakat yang berbeda-beda secara sosial.

Howard Wrigins : integrasi berarti penyatuan bangsa-bangsa yang berbeda dari suatu masyarakat menjadi suatu keseluruhan yang lebih utuh atau memadukan masyarakat - masyarakat kecil yang banyak menjadi satu bangsa.



Integrasi sosial berarti pendekatan negara dan pendekatan masyarakat (*integrasi yg ditopang oleh nilai-nilai kebebasan, kesetaraan, persaudaraan, trust dan toleransi*).

Perpaduan harmonis berbagai unsur yg berbeda (plural)



KONSEP INTEGRASI NASIONAL

2 dimensi Integrasi nasional menurut James J. Coleman dan Carl G. Rosberg :

Vertikal (elit-massa) = dimensi yang berkaitan dengan upaya menyatukan persepsi, keinginan, dan harapan yang ada antara elit dan massa atau antara pemerintah dengan rakyat. Dikenal dengan *Integrasi Politik*.

Horizontal (teritorial) = dimensi yang berkaitan dengan upaya mewujudkan persatuan diantara perbedaan yang ada dalam masyarakat (SARA) dikenal dengan *Integrasi Territorial*.

5 BENTUK INTEGRASI MENURUT WEINER

1. Integrasi Bangsa.

Kesadaran masyarakat majemuk untuk bersatu karena adanya kesadaran nasional

2. Integrasi Wilayah.

Pengelolaan wilayah kekuasaan yang menimbulkan kebanggaan dan identitas nasional

3. Integrasi Nilai. Prosedur penyelesaian konflik melalui penyatuan nilai sosial berdasarkan kesepakatan bersama

4. Integrasi Elite-Massa.

Pendasaran komitmen antara pemerintah dan yang diperintah. Upaya penciptaan kesamaan nilai dan aspirasi antara keduanya

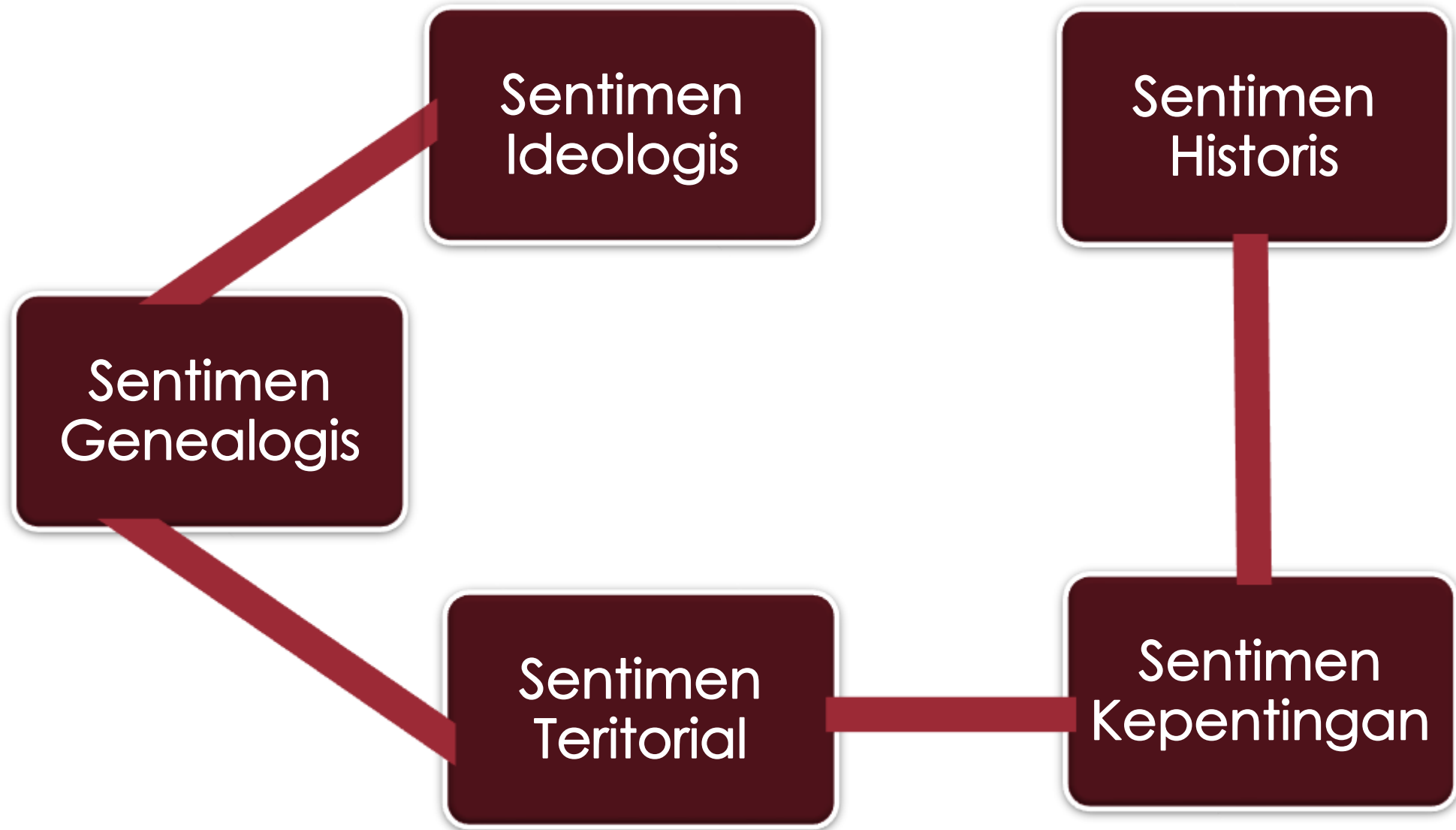
5. Integrasi Tingkah Laku. Upaya penciptaan tingkah laku sosial yang sama untuk mewujudkan tujuan bersama

CONTOH KONFLIK DAN DISINTEGRASI		DIMENSI	
		Struktural	Kultural/ primordial
BENTUK KONFLIK	Vertikal	Perburuhan	Pergolakan Aceh dan Papua
	Horizontal	Konflik pribumi vs keturunan	Konflik kalbar, sampit, dll

PENDEKATAN MEMBANGUN INTEGRASI SOSIAL

RANAH PENGELOLAAN	NEGARA	MASYARAKAT (ALTERNATIF)
Masyarakat	Birokrasi dan regulasi	Otonomi dan partisipasi
Keragaman dan kepentingan	Regiminasi	Pluralisme
Konflik	Koersi dan represi	Dialog/kontrak sosial
Sumberdaya ekonomi	Ekstrasi, pertumbuhan	Distribusi

Faktor Pendukung Integrasi Nasional



SYARAT TERJADINYA INTEGRASI

Anggota masyarakat merasa mereka berhasil saling mengisi kebutuhan-kebutuhan mereka. Sehingga ada rasa saling membutuhkan

Adanya norma dan nilai sosial yang disepakati sebagai pedoman interaksi sosial

Norma dan nilai yang berlaku, tidak mudah berubah-ubah, dan dijalankan secara konsisten

PROSES TERBENTUKNYA INTEGRASI

PROSES INTERAKSI dilandasi adanya saling pengertian dengan saling menjaga hak dan kewajiban antar pihak.

PROSES IDENTIFIKASI Proses untuk memahami sifat dan keberadaan orang lain



KERJASAMA Adanya kepentingan yang sama → kerja sama antar berbagai komponen.

PROSES AKOMODASI Penyelesaian konflik tanpa menghancurkan pihak lawan yaitu dengan cara menguatkan kepentingan yang sama atau melahirkan kesepakatan baru, adaptasi dan asimilasi

TANTANGAN INTEGRASI



TANTANGAN INTEGRASI

1. Usaha untuk menghadapi Ancaman (musuh-musuh) dari luar.
2. Gaya politik yang dimiliki oleh para pemimpin untuk mengurangi perbedaan dan memicu rakyat untuk mencapai kemajuan.
3. Peran lembaga-lembaga politik dan administratif
4. Perluasan kesempatan dan pertumbuhan ekonomi yang luas.
5. Ideologi nasional yang menentukan tujuan dan cara pencapaiannya.

TEORI INTEGRASI

**Teori Fungsional
Struktural**

Teori Konflik

**Interaksionisme
Simbolik**

Etnometodologi

Teori Pertukaran